

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI
PEMERINTAH, TENAGA KERJA DAN ICOR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI D.I YOGYAKARTA
TAHUN 2004-2013**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Ekonomi**

Syariah

Oleh:

NUR FAJRI KHUMAIROH

NIM. 12810018

PEMBIMBING

MUKHAMADYAZID AFANDI, M.Ag

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan selama 10 tahun terakhir (2004-2013). Namun sayangnya, distribusi pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta terhadap PDB di Indonesia menduduki posisi terendah dari provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa dan berada di urutan ke 20 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta tahun 2004-2013. Model penelitian ini berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Harrold Domar dan Robert Solow. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Data panel dengan pendekatan Fixed Effect model (FEM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2004 sampai tahun 2013, variabel desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Sedangkan variabel Investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat probabilitas sebesar 0,4459. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 57,22%. Artinya bahwa variabel independen (desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR) mampu menjelaskan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) sebesar 57,22% sedangkan 42,78% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kata Kunci: *Pertumbuhan, Desentralisasi Fiskal, Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan ICOR*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Fajri Khumairoh
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fajri Khumairoh
NIM : 12810018
Judul Skripsi : **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan ICOR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D. I Yogyakarta Tahun 2004-2013)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Pembimbing



Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag

NIP. 19720913 200312 1 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-721.1/Un.02/DEB/PP.05.3/06/2016

Skripsi / tugas akhir dengan judul :

“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan ICOR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I Yogyakarta Tahun 2004-2013)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Fajri Khumairoh

NIM : 12810018

Telah dimunakaqasyahkan pada: 07 Juni 2016

Nilai : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag

NIP. 19720913 200312 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.

NIP. 19661119 199203 1 002

Joko Setyono, S.E. M.Si

NIP.19730702 200212 1 001

Yogyakarta, 07 Juni 2016

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,



Dr. Tonu Qizam, SE., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19680102 199403 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fajri Khumairoh

NIM : 12810018

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan ICOR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I Yogyakarta Tahun 2004-2013**)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Penyusun



Nur Fajri Khumairoh
NIM: 12810018

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai *civitas* akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fajri Khumairoh
NIM : 12810018
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan ICOR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I Yogyakarta Tahun 2004-2013)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2016
Yang menyatakan



(Nur Fajri Khumairoh)

HALAMAN MOTTO

"i you want to learn, so u have a question, a person who asks a question is a fool for a minutes and a person who never asks is a fool for a lifetime"

" when u've been shot with guilt, stabbed with elf-pity, punched with agony, and limping with misery tied upon your back. U could be crawling right now, but u've managed to get up. "

HALAMAN PERSEMBAHAN

- **Ayahanda (Alm). Suswiharyanto BA.**

Cita-citamu yang menginginkan keenam anakmu untuk menuntaskan pendidikan sampai Sarjana akhirnya terwujud.

- **Ibunda Siti Robiah.**

Perjuanganmu untuk anak-anakmu tak bisa terbayar dengan apapun itu. Terima kasih telah menjadi sosok yang tangguh, mengagumkan, inspirasional, dan membanggakan.

- **Kakak-kakakku;**

Hanifatun Naimi S.H, Laili Istiadah S.Pd, Achmad Fachrurrozi S.E, Nur Azizah S.Sos.i dan Siva Maskuri S.T.

Kakak-kakak iparku;

Eko Mardiono M.Ag, R.Agung Hermawan Fitrianto S.Sn dan Nindiya.

Yang telah memberikan begitu banyak support moral dan finansial, nasihat dan teguran yang membangun untuk adik kalian yang paling kecil ini.

- **Civitas Akademik UIN SUKA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amin.

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan liku-liku yang membuat penulis harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian.

Penelitian ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pembimbing materi maupun teknis. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ibnu Qizam, SE., Akt., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
3. Bapak M.Yazid Affandi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan banyak memberi arahan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak M. Ghafur Wibowo, SE., M.Sc. selaku Kaprodi Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak/Ibu Dosen dan jajaran staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah 2012 khususnya EKSA (A) angkatan 2012.
7. "Best Friends" Nofita, Mifta sejak dibangku Putih abu-abu SMA N 1 PAKEM sampai di UIN SUKA.
8. Teman-teman KKN posko Ngaseman, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Penyusun,

Nur Fajri Khumairoh
NIM. 12810018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'		

	Zā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	‘Ain	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	Gain	‘	koma terbalik di atas
	Fā'	g	ge
	Qāf	f	ef
	Kāf	q	qi
	Lām	k	ka
	Mim	l	‘el
	Nūn	m	‘em
	Waw	n	‘en
	Hā'	w	w
	Hamzah	h	ha
	Ya	‘	apostrof
		Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis	Muta’addidah
	Ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
--------------	---------	---------------

	Ditulis	<i>Jizyah</i>
--	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ِ	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi	16
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	17
2.2.2 Teori Pertumbuhan Harrold Domar	18
2.2.3 Teori Neo Klasik	19

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam	21
2.3 Desentralisasi fiskal.....	24
2.3.1 Penerimaan Daerah.....	25
2.3.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	26
2.3.3 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).....	27
2.3.4 Desentralisasi Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	28
2.4 Pengeluaran Pemerintah	30
2.4.1 Teori Wanger.....	30
2.4.2 Teori Musgrave dan Rostow	32
2.4.3 Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam	32
2.5 Tenaga Kerja.....	34
2.5.1 Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam	36
2.6 ICOR.....	37
2.6.1 ICOR dalam Perspektif Ekonomi Islam	37
2.7 Telaah Pustaka	40
2.8 Kerangka Pemikiran	44
2.9 Hipotesis	45
2.9.1 Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.	45
2.9.2 Hubungan Investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.	46
2.9.3 Hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi.	47
2.9.4 Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi.	48
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	50
3.2 Populasi dan Sampel	50
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	51
3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	51
3.3.2 Desentralisasi Fiskal	52
3.3.3 Investasi Pemerintah	52
3.3.4 Tenaga Kerja	53
3.3.5 ICOR.....	53
3.4 Data dan Sumber Data.....	54

3.5 Metode Pengumpulan Data	54
3.6 Metode Analisis	55
3.6.1 Pendekatan <i>Fixed Effects Model</i> (FEM)	57
3.6.2 Pendekatan <i>Random Effects Model</i> (REM)	57
3.6.3 Pendekatan <i>Common Effect</i>	58
3.7 Teknis Analisis Data	58
3.7.1 Uji Spesifikasi Model	58
3.7.2 Pengujian Hipotesis	60
BAB IV	62
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	62
4.1.1 Keadaan Geografis	62
4.1.2 Gambaran Perekonomian	63
4.1.3 Desentralisasi Fiskal	64
4.1.4 Investasi Pemerintah	65
4.1.5 Tenaga Kerja	66
4.1.6 ICOR	67
4.2 Analisis Regresi Data Panel	69
4.2.1 Uji Spesifikasi Model	69
4.2.1.1 Hasil <i>Uji Chow</i>	69
4.2.2 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	70
4.3 Pengujian Hipotesis	71
4.3.1 Uji F	71
4.3.2 Uji t	72
4.3.3 Koefisien Determinasi	73
4.4 Pembahasan	73
4.4.1 Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ..	73
4.4.2 Pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ..	75
4.4.3 Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi	77
4.4.4 Pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi	78
BAB V	80
PENUTUP	80

5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran 1	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi PDRB Atas Harga Konstan 2000 di Indonesia Tahun 2006-2013.....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi di D. I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota ADHK 2000, Periode 2010-2013	63
Tabel 4.2	Derajat Desentralisasi Fiskal Menurut Kabupaten/Kota di D. I Yogyakarta ADHK 2000, Periode 2010-2013	64
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Investasi Pemerintah di D. I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota ADHK 2000, Periode 2010-2013.....	65
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di D. I Yogyakarta, 2010-2013.....	67
Tabel 4.5	Nilai ICOR di DIY menurut Kabupaten/Kota di D. I Yogyakarta 2010-2013	68
Tabel 4.7	Uji <i>Chow</i>	69
Tabel 4.8	Uji <i>Hausman</i>	70
Tabel 4.9	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	70
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik F	72
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik T	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi D I. Yogyakarta dan Nasional ADHK 2000 Tahun 2004-2013 (persen)	3
Gambar 1.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DIY Tahun 2005–2012	5
Gambar 1.3	Laju Rasio Total PAD terhadap TPD dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di D.I Yogyakarta Tahun 2007–2010	6
Gambar 1.4	Perkembangan Rasio Total Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 D.I Yogyakarta Tahun 2006–2013	8
Gambar 1.5	ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2008-2013.....	10
Gambar 2.1	Grafik Pertumbuhan Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah menurut Wanger	31
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Penelitian	44
Gambar 2.3	Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mutlak (Hendriani, 2013: 2). Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000: 18).

Menurut Syauqi Ahmad Dunya (dalam Asmuni, 2003:131) tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu membangun ekonomi yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an(QS, Al Anfal [8]: 60):

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

Ayat ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks persiapan jihad. Suatu negara yang sedang berjihad harus memiliki kekuatan ekonomi untuk mendukung keberhasilan berjihad itu. Hal ini mengindikasikan bahwa perintah dalam melakukan jihad dipahami sebagai perintah dalam membangun perekonomiannya.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo klasik, Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern

(Mubaroq, 2013: 3). Pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat dari besarnya PDB digunakan sebagai ukuran dari perkembangan dan kemajuan suatu perekonomian karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi suatu masyarakat dalam suatu wilayah atau negara, khususnya dalam kegiatan peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi tersebut selanjutnya memberikan dorongan pertumbuhan di region yang kuat akan menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah. Oleh karena itu, semestinya peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi salah satu target dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Atas Harga Konstan 2000
di Indonesia Tahun 2006-2013

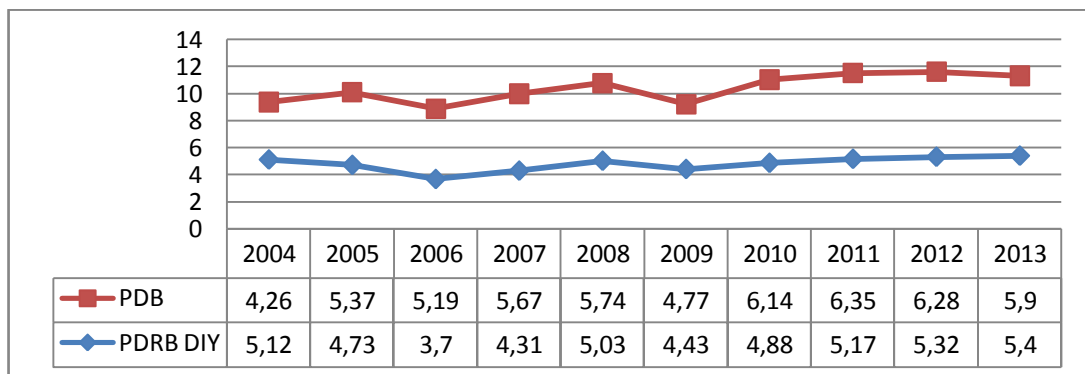
Provinsi	2010	2011	2012	2013
Jumlah 33 Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00
DKI Jakarta	16,28	16,30	16,39	16,57
Jawa Timur	14,70	14,67	14,87	14,99
Jawa Barat	14,57	14,30	14,11	14,12
Jawa Tengah	8,40	8,27	8,26	8,23
Riau	6,53	6,86	6,97	6,89
Kalimantan Timur	6,08	6,50	6,23	5,61
Sumatera Utara	5,19	5,21	5,21	5,33
Banten	3,24	3,19	3,17	3,23
Sumatera Selatan	2,98	3,03	3,06	3,06
Sulawesi Selatan	2,23	2,28	2,37	2,44
Lampung	2,05	2,12	2,15	2,17
Sumatera Barat	1,65	1,64	1,64	1,68
Aceh	1,49	1,45	1,41	1,36
Kep, Riau	1,35	1,33	1,35	1,32
Bali	1,27	1,23	1,25	1,25
Papua	1,66	1,27	1,15	1,23
Jambi	1,02	1,05	1,08	1,13
Kalimantan Barat	1,14	1,11	1,11	1,12
Kalimantan Selatan	1,13	1,13	1,13	1,10
DI Yogyakarta	0,86	0,86	0,85	0,84
Kalimantan Tengah	0,80	0,81	0,83	0,84
Sulawesi Tengah	0,70	0,74	0,76	0,77

Nusa Tenggara Barat	0,94	0,81	0,7	0,74
Sulawesi Utara	0,70	0,69	0,70	0,70
Papua Barat	0,51	0,60	0,64	0,67
Sulawesi Tenggara	0,54	0,53	0,54	0,54
Nusa Tenggara Timur	0,52	0,52	0,52	0,53
Kep, Bangka Belitung	0,50	0,51	0,51	0,51
Bengkulu	0,35	0,35	0,36	0,36
Sulawesi Barat	0,21	0,21	0,21	0,21
Maluku	0,15	0,16	0,17	0,17
Gorontalo	0,15	0,15	0,15	0,16
Maluku Utara	0,10	0,10	0,10	0,10

Sumber : BPS (Diolah)

Bila melihat dari tabel diatas, secara nasional distribusi PDRB terhadap PDB sangat bervariasi. Dari data diatas, hal yang cukup menarik adalah persentase distribusi PDRB D.I Yogyakarta terhadap PDB menduduki posisi ke 20 dari 33 Provinsi di Indonesia dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Terlihat dari data tersebut pada tahun 2010 PDRB D.I Yogyakarta menyumbang hanya sekitar 0,86%, konstan pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 dan 2013 justru mengalami penurunan 0,1% dari 0,85 menjadi 0,84 %. Bahkan jumlah persentase distribusi PDRB D.I Yogyakarta pada tahun 2012 menempati urutan paling bawah dari seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi D I. Yogyakarta dan Nasional
ADHK 2000 Tahun 2004-2013(persen)



Sumber: BPS (data diolah)

Berdasarkan data diatas, laju pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta sebesar 5,17 % pada tahun 2011 dan naik sebesar 0,15% pada tahun 2012 menjadi 5,32% dan pada tahun 2013 kembali naik menjadi 5,40%. Namun, meningkatnya pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta tidak diikuti dengan kenaikan persentase distribusi PDB. Itu berarti bahwa pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

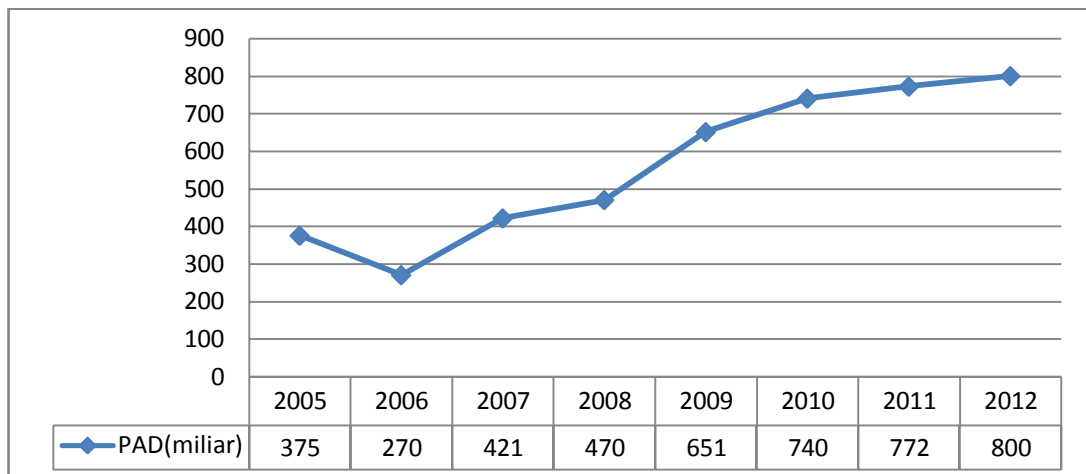
Masih rendahnya pertumbuhan D. I Yogyakarta dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional seharusnya mendorong pemerintah D.I Yogyakarta untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar lebih dioptimalkan, hal ini didukung dari kebijakan otonomi dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Desentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah daerah akan semakin memperbesar penerimaan daerah dan juga tercapainya efisiensi pengeluaran, karena proyek-proyek yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah (Damarik: 79). Kebijakan ini diatur dalam UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004 (Apriesa, 2013: 3). Dengan adanya pendelegasian wewenang ke daerah tersebut dibanyak daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial bisa mengelola sumber dayanya sendiri sebagai maksud dan tujuan dari otonomi daerah.

Sesuai dengan amanat UU 32/2004 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi penerimaan daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah (Rinduansyah, 2003: 49) dan kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Pendapatan Asli Daerah yang *notabene* mencerminkan suksesnya kebijakan desentralisasi fiskal sangat berpengaruh terhadap PDRB (Adi, 2005: 20). Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2006) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Mubaroq, 2013: 3).

Gambar 1.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DIY Tahun 2005–2012 (Milyar)

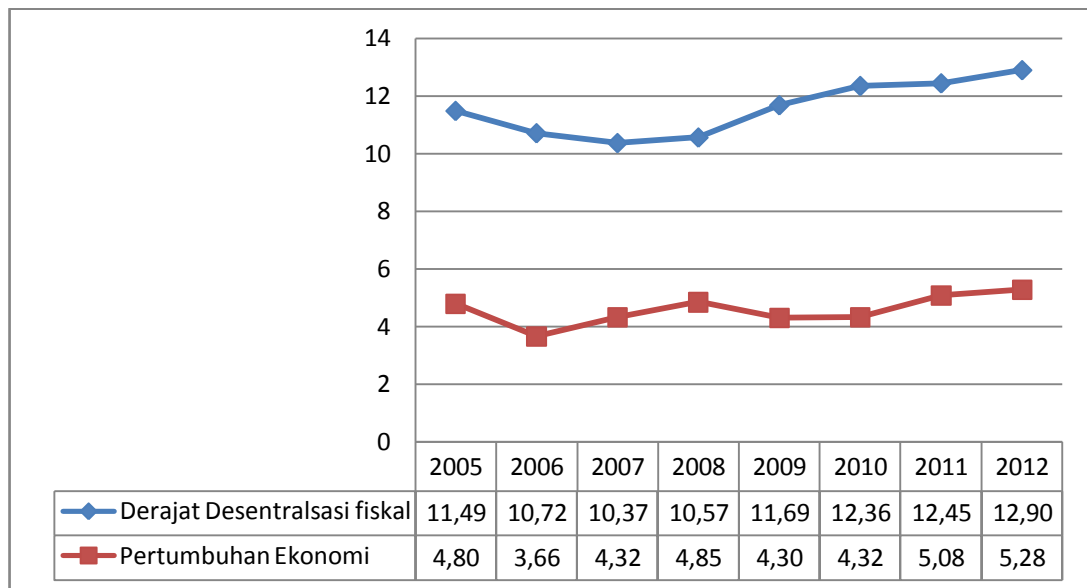


Sumber: Sistem Aplikasi Data DIY (Diolah)

Secara nominal, perkembangan PAD yang digali oleh pemerintah daerah di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2005–2012 terus mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Dari semula Rp.375 milyar pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp.800 Miliar pada tahun 2013.

Gambar 1.3 Laju Rasio Total PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah di D.I Yogyakarta
Tahun 2007–2010(Persen)



Sumber: Sistem Aplikasi Data & BPS DIY (Diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat derajat desentralisasi fiskal/kemandirian daerah yang diukur dengan rasio PAD terhadap TPD di D.I Yogyakarta menunjukkan pola yang cenderung meningkat dimana awalnya sebesar 11.49 % pada tahun 2005 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi sebesar 10.37 % dan kemudian mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggalan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan secara baik/maksimal. Terus meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberi sinyal bagi kemampuan daerah dalam

mengatur daerahnya dan juga dalam melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

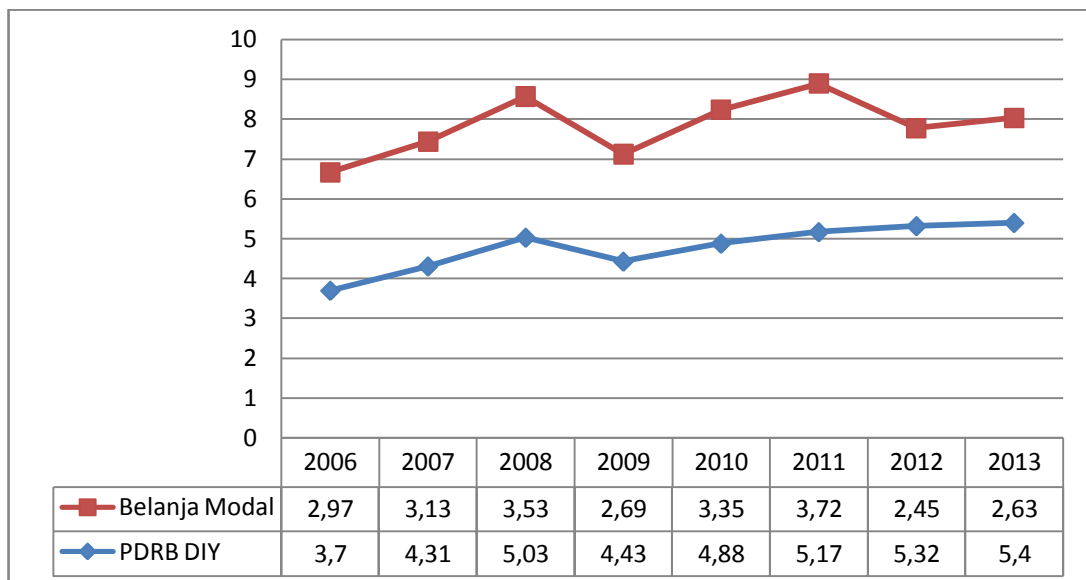
Salah satu kebijakan daerah adalah kebijakan investasi pemerintah. Todaro (2003) menyampaikan bahwa akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Menurut Sasana (2006) investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengalokasikan dana untuk berbagai proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur fisik untuk membangun sarana dan prasarana umum. Investasi pemerintah daerah tersebut dirinci dalam belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal pemerintah akan meningkatkan produktivitas daerah, menyerap tenaga kerja dan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Sodik (2007) yang didukung oleh penelitian Atahrim (2013) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian Suryono (2010) juga menunjukkan hasil serupa bahwa belanja pembangunan berdampak atau berpengaruh terhadap meningkatnya PDRB.

Yogyakarta sebagai kota budaya yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan memiliki potensi yang tinggi sebagai daerah maju. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang melimpah. Namun, pada kenyataannya potensi yang cukup tinggi ini kurang didukung dengan investasi yang diberikan oleh pemerintah.

Secara nominal, meskipun belanja daerah selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi bila dilihat secara rasio maka rasio total belanja modal kabupaten/kota terhadap total PDRB nominal Kabupaten justru fluktuatif dan peningkatan belanja modal masih dibawah peningkatan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dari semula 2,97% pada tahun 2005 berangsur-angsur berkurang menjadi 2,45% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sangat kecil yaitu sebesar 0,22 % menjadi sebesar 2.63%.

Gambar1.4 Perkembangan Rasio Total Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 D.I Yogyakarta Tahun 2006–2013(persen)



Sumber: Sistem Aplikasi Data DIY (Diolah)

Faktor pembangunan ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain keuangan daerah adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Hal ini sejalan dengan teori neo klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta teknologi (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 250).

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah maka diperlukan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di daerah daerah dapat terbentuk apabila suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar juga. Pertumbuhan penduduk yang besar ini cenderung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi lamban apabila jumlah tenaga kerja yang ada tidak bisa terserap dengan baik dalam lapangan pekerjaan yang ada di daerah. Untuk itu dengan adanya pembangunan daerah maka diharapkan akan membuka jumlah lapangan pekerjaan baru di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk bisa menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Semakin banyak penduduk yang bekerja, semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan, dengan begitu kesejahteraan penduduk akan meningkat yang berarti akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun menyatakan tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran (Dornbuch, 2006:13).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) menunjukkan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Diperkuat oleh penelitian Suryanto (2011) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Subosukawonosraten.

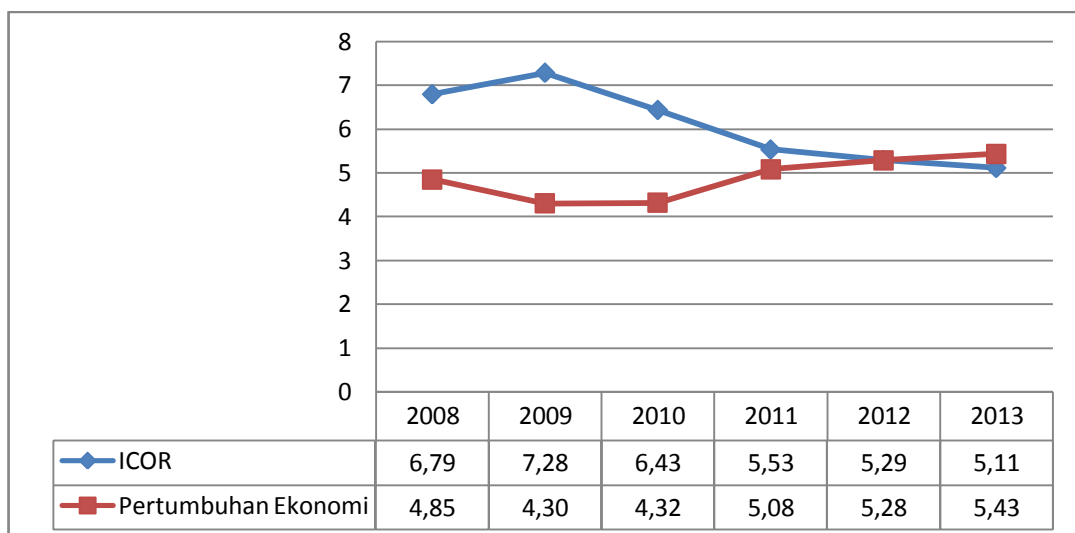
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), persentase tenaga kerja penduduk D.I Yogyakarta umur 15 tahun ke atas yang

bekerja setiap tahunnya pada tahun 2010-2013 selalu meningkat. Tahun 2010 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 0,13% namun kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 1.847.070 jiwa di tahun 2013 (BPS dan BAPPEDA DIY, 2013: 54).

Selain PAD, belanja modal dan tenaga kerja, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di daerah maka diperlukan juga adanya perkiraan kebutuhan investasi yang tepat dan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Harrold Domar mengkaitkan adanya pengaruh tambahan *stock capital* terhadap output yang dikenal dengan nama ICOR. Perhitungan ICOR menjadi penting karena dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu yang diharapkan dengan tepatnya kebutuhan investasi maka investasi tersebut menjadi lebih efisien.

Gambar 1.5 ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2008-2013 (persen)



Sumber: BPS 2013 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai ICOR mengalami tren menurun. Artinya kenaikan *output* (PDRB) yang dihasilkan

membutuhkan investasi yang lebih sedikit. Nilai ICOR pada tahun 2011 jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2012 nilai ICOR D. I Yogyakarta turun menjadi 5,79. Dari data diatas juga dapat dilihat meski mengalami penurunan namun rata-rata ICOR di D.I Yogyakarta masih tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2008-2013 rata-rata nilai ICOR sebesar 6,07. Angka ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Rp.1 unit output dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp.6,07. Angka ICOR sebesar 6,07 menunjukkan angka yang tidak efisien.

Widodo (1990) menyatakan bahwa secara umum, nilai ICOR yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3 – 4, semakin tinggi ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Semakin rendah ICOR mengindikasikan kemungkinan terjadinya efisiensi penggunaan input investasi untuk produksi dimana efisiensi sendiri terjadi akibat adanya teknologi.

Teori Neo klasik yang menjelaskan bahwa teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibuktikan oleh Kusumawardani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bandung” yang hasilnya adalah teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ada hubungan antara tingkat kemandirian daerah sebagai tolok ukur keberhasilan desentralisasi fiskal, Investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun peran faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih dalam dalam bentuk hubungannya, apakah faktor-faktor tersebut benar-benar menjadi penentu sehingga memberi

pengaruh yang besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi karena dampak dari pengaruh keempat faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terasa jika diteliti dalam jangka waktu yang cukup panjang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk melihat sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan ICOR terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I Yogyakarta Tahun 2004-2013.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada periode Tahun 2004-2013?
2. Bagaimana pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada periode Tahun 2004-2013?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada periode Tahun 2004-2013?
4. Bagaimana pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada periode Tahun 2004-2013?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013.
2. Untuk mengkaji pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada Tahun 2004-2013.
3. Untuk mengkaji pengaruh tenaga kerja, terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada Tahun 2004-2013.
4. Untuk mengkaji pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta pada Tahun 2004-2013.

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya:

1. Manfaat Akademisi

Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi daerah.

1.4 Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan titik tolak dan menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang yang menguraikan isu dan beberapa fenomena tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya melalui penelitian ini dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang mencakup uraian singkat pembahasan materi setiap bab dalam penelitian. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang dilakukan oleh peneliti.

Bab II Landasan Teori memuat tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pertumbuhan ekonomi yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini adalah definisi dan teori mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, tenaga kerja, ICOR dan juga dijelaskan dalam perspektif Ekonomi Islam. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis berdasarkan landasan teori yang digunakan. Arti penting dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan kerangka dalam melandasi penelitian.

Bab III Metode Penelitian berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian (pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja

dan ICOR), definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, pada permulaan akan digambarkan secara singkat keadaan geografis, demografis, dan perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta untuk mengetahui fenomena dan permasalahan yang ada. Kemudian, bab ini dilanjutkan tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data panel.

Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini juga disampaikan keterbatasan penelitian yang dalam penelitian ini dengan tujuan agar penelitian penelitian selanjutnya lebih baik, saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta, penelitian ini berdasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga bisa mendukung tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR.

Untuk memperkuat penelitian dan supaya secara empiris dapat dihubungkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis atau yang mempunyai fokus penelitian yang hampir sama, maka akan dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga akan dijadikan acuan dan komparasi dalam penelitian ini.

2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2011:120) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu masyarakat naik dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Suryana (2000: 5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya.

Samuelson (1995: 436) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/*output* dari suatu negara.

Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik menurut pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga (Arsyad, 2010:115):

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

2.2.2 Teori Pertumbuhan Harrold Domar

Teori Harrold Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang.

Teori ini mengharuskan dalam perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Namun, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto atau stok modal (*capital stock*) (Arsyad, 2010:86).

Adapun asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah: (Arsyad, 2010:86).

1. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh
2. Berlangsung dalam dua perekonomian sektor (sektor rumah tangga dan sektor perusahaan)
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik origin(nol)
4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save, MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal dan output (Incremental Capital Output Ratio).

Diasumsikan juga terdapat hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal (K), dengan GNP total (Y). Setiap tambahan netto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP

$$\Delta Y/Y = s/k$$

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (s), serta rasio modal output nasional (k) (Lincoln, 2010:86). Secara lebih spesifik, persamaan tersebut mentakan bahwa tanpa adaya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin besar bagian GNP yang ditabung atau diinvestasikan, maka pertumbuhan GNP yang akan dihasilkan menjadi lebih besar), dan berbanding terbalik dengan rasio modal output di suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output nasional (k), maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah). Jadi berdasarkan teori Harrold-Domar agar dapat tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin GNP-nya.

2.2.3 Teori Neo Klasik

Teori yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Swan ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Model ini merupakan ekstensi dari pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-

faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan teknologi.

Modal dan tenaga kerja dapat saling mensubstitusi satu sama lain. Solow mengasumsikan bahwa setiap faktor produksi akan mengalami *diminishing return*, yakni jika input ditambahkan terus menerus maka output akan bertambah tetapi dengan tingkat pertambahan yang semakin mengecil. Oleh karena itu investasi yang terus menerus belum tentu akan dapat memberikan pertumbuhan yang permanen. Dengan demikian kemajuan teknologi akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pandangan teori Neo Klasik ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya (Arsyad, 2010: 88).

Bentuk model ini didasarkan pada fungsi produksi sederhana dari output (Y), kapital (K) dan tenaga kerja (TK) serta teknologi (T) sebagaimana terlihat pada persamaan berikut (Barro dan Martin, 2004:28) :

$$Y = F(K, TK, T) \quad (2.1)$$

Sedangkan dalam keadaan tanpa adanya perubahan teknologi maka persamaan (II – 1) dapat ditulis sebagai berikut (Van Den Berg, 2001:115):

$$Y = F(K, TK) \quad (2.2)$$

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Ekonomi Islam pada dasarnya Islam memandang pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* “Pertumbuhan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia”(Chapra,2000:6).

Dalam Ekonomi Islam, strategi pengembangan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Siddiqi mempunyai khas yang utama yaitu bahwa keadilan sosial dan kemakmuran berjalan bergandengan. Ini terjadi karena adanya motivasi bahwa Islam melaksanakan segala sesuatu untuk perkembangan ekonomi. Alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bukanlah merupakan pendorong utama dalam Islam. Usaha-usaha pengembangan umumnya bersifat sosial, tiap individu secara sukarela bekerja sama di dalam usaha tersebut (Siddiqi,1986:26).

Pemahaman tentang konsep pembangunan ekonomi Islam terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an (QS,Hud [11]: 61):

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهِمُ صَالِحًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ هُوَ
أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تَوَبَّوْا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ



Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, makna *al-wujub* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi

sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, *al-imarah* atau memakmurkan merupakan perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk membangun alam.

Islam tidak menolak konsep objektif apapun yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dunya (dalam Asmuni, 2003: 132) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara konsep Islam dan konsep ekonomi konvensional tentang pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya sebenarnya terletak pada filsafat dan prinsipnya, bukan pada metode yang digunakan. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan “antar” bukan tujuan ‘akhir” yang berarti bahwa Islam menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan masyarakat yang dikaitkan dengan kenyamanan, kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir (Ash-Shadr, 2008: 427). Karenanya menurut Ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator pembangunan ekonomi merupakan suatu kue atau sarana yang digunakan untuk menjamin tegaknya keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Naqvi, 1981: 134).

Langkah yang dilakukan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah melalui produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia (Qardhawi, 1997: 19). Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna (*utility*), dengan demikian meningkatkan akan kesejahteraan ekonomi. Maka barang dan jasa yang diproduksi itu hanya yang dibolehkan dan menguntungkan menurut Islam (Haneef, 2010: 29).

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas dalam segala bentuk seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri,

perdagangan, dan sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkahi perbuatan duniawi dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT dan perjuangan di jalan-Nya (Hakim, 2012:64).

Al-Qur'an telah merujuk secara singkat berbagai cara yang dibolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tak terbatas, bagaimana manusia dapat menggunakan sumber-sumber pertanian dan tambang, kekayaan biologis serta sarana telekomunikasi dan transportasi dalam proses produksi, karena Islam mendorong pemanfaatan potensi alam dan kekayaan semaksimal mungkin (Ash-Shadr, 2008:400).

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariat Islam (Hakim, 2012:65).

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan dicapai *falah* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia (P3EI UII Yogyakarta, 2008:264).

2.3 Desentralisasi fiskal

Menurut Prawirosetoto (2003), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods and public services*).

Ada dua keuntungan yang dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal (Ebel dan Yilmaz, 2002), antara lain:

1. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan/pilihan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakat daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah akan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat daerahnya.

2. Persaingan antara pemerintah daerah

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih

baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode “*vote by feet*” dalam menentukan barang publik di wilayah mana, yang akan dimanfaatkan.

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain (Nurman,2013:5). Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variables*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Penelitian ini akan menggunakan *share* penerimaan daerah (Penerimaan Asli Daerah) terhadap total penerimaan daerah untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal.

2.3.1 Penerimaan Daerah

Dalam mengalokasikan pembelajaan atas sumber-sumber penerimaan daerah terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Sutrisno (1894: 200) PAD adalah pendapatan yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana yang ada di daerah untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi, PAD diartikan sebagai pendapatan yang rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi

penerimaan sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai daerah otonomi.

PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal namun harus tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Simanjuntak dalam Siagian 2011:22).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi terciptanya keseimbangan fiskal pusat dan daerah, terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

2.3.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan otonomi daerah mengakibatkan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan sendiri yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur daerahnya dalam batasan hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal ini tercatum dalam *European Charter of Local Self Government* (Bailey dalam Siagian 2010:25):

Local self government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interest of the local population...local authorities shall be entitled within national economic

policy to adequate financial recourses of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers.

Sehingga dengan diberlakukannya kebijakan/sistem otonomi daerah, maka setiap wilayah kabupaten/kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan efek dinamisnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mangkoesoebroto (2001:2-8) ada 3 peran pemerintahan, yaitu:

1. **Peranan alokasi**, adalah peranan pemerintah dalam mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara tepat dan efisien;
2. **Peranan distribusi**, adalah peranan pemerintah dalam mewujudkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang merata;
3. **Peranan stabilitas**, adalah peranan pemerintah dalam menjaga kestabilan kondisi perekonomian, karena perekonomian yang diserahkan kepada pasar akan rentan terhadap goncangan perekonomian.

2.3.3 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaan daerah terkait dengan fungsi kebijakan desentralisasi fiskal, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dana belanja pemerintahan daerah yang dituangkan dalam APBD. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) berisi rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya sebagai daerah otonomi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran.

2.3.4 Desentralisasi Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Tujuan adanya kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan ekonomi baik dalam lingkup negara maupun daerah.

Dalam negara Islam stabilitas perekonomian dianggap wajib. Kelancaran arus uang menjadi penting untuk mencegah penurunan permintaan agregat dan *supply*. Kebijakan fiskal untuk mengurangi agregat dan meningkatkan produktivitas akan diperlukan ketika ekonomi berada dibawah kondisi inflasi. Pajak progresif atas penghasilan dan pengeluaran serta jaminan sosial dapat bertindak sebagai stabilisator otomatis bagi perekonomian (Setianingrum,2013:7).

Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam adalah: 1) Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu: sektor swasta, sektor sosial, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam; 2) Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal; 3) Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sektor tersebut secara bersama-sama; 4) Peran sektor publik dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas. Fungsi alokasi ekonomi Islam juga memerlukan rancangan sistem pajak, untuk optimalisasi alokasi sumber daya masyarakat antara berbagai sektor ekonomi (Setianingrum,2013:8).

Pandangan pemikir Islam seperti Imam Malik dan Ibnu Hazm bahwa kebijakan fiskal Islam diluar zakat adalah sistem pajak. Warga negara membayar

pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah (QS. An-Nisaa [04]: 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذَلِكُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para Ulil Amri, selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi secara efektif (Chapra, 2000:294).

Namun, sistem pajak dibenarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, jaminan untuk kebutuhan minimal orang miskin, biaya yang sangat diperlukan yang melindungi kepentingan kolektif masyarakat, karena dana yang digunakan berasal dari rakyat dan harus kembali ke rakyat, dan juga penggunaan perpajakan untuk tujuan redistribusi pendapatan.

Dari uraian tentang kebijakan fiskal diatas, dapat dipahami bahwa dalam percepatan pembangunan dan stabilitas ekonomi, adanya kewenangan otonomi yang bersumber dari pajak dan sumber-sumber daerah yang lainnya sebagai alat

stabilitas moneter tersebut maka pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan daerah ke proyek-proyek esensial karena pemerintah daerah lebih tahu potensi daerahnya lebih baik dari pemerintah pusat yang akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pengeluaran dan kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dapat terciptanya realisasi tujuan pembangunan dan keadilan ekonomi. Namun untuk menjaga perpajakan dalam batas yang wajar, semua pengeluaran boros harus dihindari dan pengeluaran administrasi harus ditekan ketingkat yang minimum.

2.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu unsur permintaan agregat yang mencerminkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah perubahan atau pengeluaran pemerintah dengan tujuan menstabilkan tingkat harga serta output maupun kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2000:122).

2.4.1 Teori Wanger

Wanger dalam Mangkusubroto (1998:171) mengemukakan teori yang dikenal dengan hukum Wanger yaitu di sebuah perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dari hukum tersebut maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang saling terkait dan tarik menarik antara pendapatan perkapita dengan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini Wanger menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama pemerintah harus mengatur masalah yang muncul dalam

masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Hukum Wanger dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_K PP_1}{PPK_1} < \frac{P_K PP_2}{PP_2} < \dots < \frac{P_K PP_n}{PPK_n}$$

Keterangan:

$P_K PP$ = Pengeluaran pemerintah per kapita

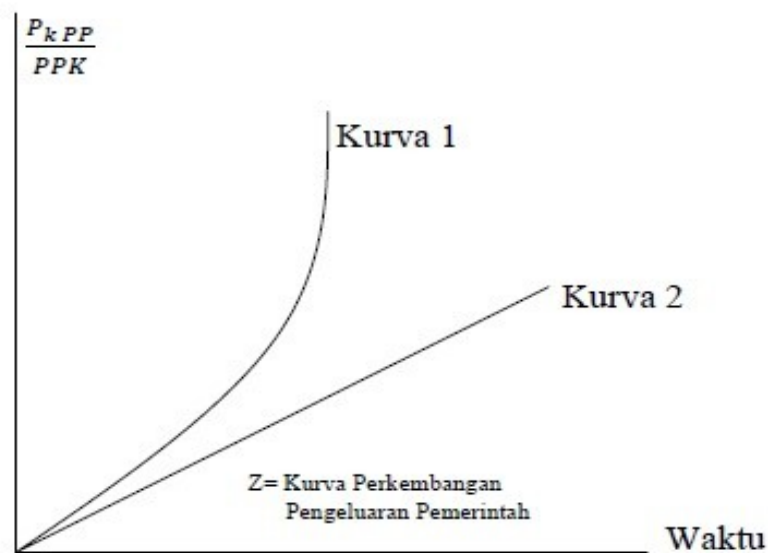
PKK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n = Jangka waktu (tahun)

Hukum Wanger diatas dapat ditunjukkan dalam grafik berikut ini dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang dibuktikan oleh kurva 1, dan bukan ditunjukkan oleh kurva 2.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wanger



Sumber : Mangkoesoebroto, (1998)

2.4.2 Teori Musgrave dan Rostow

Musgrave dan Rostow mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah. Menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran pembangunan negara yang besar dalam bentuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek (Darma, 2011: 8).

2.4.3 Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada masa pemerintahan Rasulullah dan para sahabat, infrastruktur adalah hal yang sangat penting dan mendapatkan perhatian yang lebih dan porsi yang besar dibanding dengan pengeluaran-pengeluaran lain. Pada zaman Rasulullah, pembangunan infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini diikuti oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a dengan mendirikan kota dagang besar, yaitu Basrah (pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan Kuffah (pintu masuk perdagangan dengan Persia). Khalifah Umar juga membangun kanal dari Fustat ke laut merah agar orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik unta karena mereka bisa menyebrang dari Sinai langsung menuju laut merah. Khalifah Umar juga memerintahkan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari penghasilan untuk pembangunan infrastruktur (Abdul-karim, 2007:250).

Kebijakan dan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah Umar r.a tersebut jika dikaitkan dengan teori Irving Fisher: $MV = PT$, maka kebijakan tersebut adalah untuk melepaskan T dari kondisi *full capacity*, sehingga dalam pertumbuhan ekonomi ini tidak terjadi inflasi. Melepaskan T dari kondisi *full capacity* adalah sesuatu yang sangat penting agar P tidak perlu naik atau mengalami *adjustment*. Apabila T dalam kondisi *full capacity*, dengan naiknya M, maka P akan naik dan seluruh kenaikan M sepenuhnya akan diakomodir oleh kenaikan P (Inflasi). Saat terjadi *stagflasi* atau *stagnation-inflation* dimana kenaikan permintaan agregat hanya akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan tidak menaikkan pendapatan nasional karena perekonomian sudah mencapai kondisi *full capacity/full employment*. Lalu agar terjadi kenaikan pendapatan nasional maka pemerintah harus membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi kondusif agar masyarakat bersedia berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. Dengan peningkatan produktivitas, maka penawaran agregat akan naik dan akan berefek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Abdul-karim, 2007:299).

Dari penjelasan diatas maka diambil kesimpulan bahwa dalam upaya untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan perekonomian, maka dibutuhkan pengeluaran yang bersifat pengeluaran modal/pengeluaran investasi pemerintah. Investasi pemerintah tersebut juga mendapat porsi yang lebih dibandingkan dengan porsi untuk pengeluaran yang sifatnya adalah pengeluaran rutin/konsumsi. Ash-Shadr (2008:401) mempertegas pernyataan diatas dengan alasan karena pengeluaran untuk konsumsi jauh dari kata manfaat untuk meningkatkan produksi.

Seperti firman Allah (QS. At-Taubah [09]:34):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Dengan kaidah landasan pokok yang digunakan dalam pengeluaran pemerintah adalah efisiensi dan efektifitas. Hal ini dalam islam dipandu oleh landasan-landasan syariah dan skala prioritas.

2.5 Tenaga Kerja

Menurut Disnakertrans (2006:54) tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun atau lebih) yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja, diantaranya adalah mereka yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi terpenting dalam kaitannya dengan peningkatan PDRB suatu daerah (Mankiw, 2006: 151). Menurut Todaro (2004:93) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar

domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang benar-benar cepat akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja yang ada didaerahnya. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang lainnya seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Salah satu teori yang menjelaskan hubungan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi adalah Hukum Okun. Hukum Okun menjelaskan antara output dan tingkat pekerja dengan asumsi bahwa output dan pekerja bergerak sama, jadi perubahan pada output akan menghasilkan perubahan yang sama pada tenaga kerja juga.

Persamaan Hukum Okun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Q^* - Q}{Q} = \alpha U - U^*$$

Dimana :

Q^* = output potensial

Q = output aktual

U = tingkat pengangguran

U^* =Tingkat pengangguran pembeding

α = koefisien Okun

Hukum Okun ini menerangkan mengenai hubungan output aktual dan potensial (GDP) dan pengangguran. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk

setiap penurunan 2% yang berhubungan dengan GDP Potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 % dan hukum ini menyatakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja yang menggambarkan antara pergerakan jangka pendek pada GDP nyata dan perubahan angka pengangguran (Dornbush, 2006: 13).

2.5.1 Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

Di dalam Islam tenaga kerja merupakan segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas (At-Tariqi, 2004: 171).

Islam memandang tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang merupakan sumber daya insani yang menjadi salah satu determinan yang sangat penting dalam suatu pembangunan. Hal ini mengingatkan bahwa manusia sebagai penggerak dalam pembangunan, yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan dan mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana serta meletakkannya dalam suatu wadah yaitu “pembangunan” (Aziz, 2008:25).

Menurut Syafi'i Antonio(1999:353), sumber daya manusia yang optimal memerlukan dua jenis kualitas: 1. *Professional quality* dan 2. *Moral quality*, yang mengacu pada kualitas dan kemampuan dan efisiesi kerja. Islam menghubungkan antara *professional quality* dan *moral quality* dalam (QS Al-Maidah[5]:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ نَسُوا عَهْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

صَيْدٌ حَرَامٌ وَأَنْتُمْ تَأْكُلُونَهُ ۚ يَسْتَفْهِمُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِنُوا بِهِ أُوتُوا خِلَافَ مَا حَبَسُوا عَنْهُ ۚ وَإِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَوَّاعُونَ ۚ

Dengan kata lain, *moral quality* mengacu pada kemampuan sumber daya manusia dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan tugas kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah.

2.6 ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut pada besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai (Tarigan, 2013: 49). Semakin rendah ICOR maka semakin efisien penggunaan input produksi yang akan berefek pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Harrod-Domar mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Koefisien tersebut menghubungkan antara pertambahan modal dengan pertumbuhan ekonomi (Adisasmito, 2013: 62-63).

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Dimana:

ΔK : investasi atau penambahan modal baru

ΔY : pertambahan output

2.6.1 ICOR dalam Perspektif Ekonomi Islam

DI dalam Islam, ICOR (yang merepresentasikan perkembangan teknologi) adalah yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga

manusia tersebut mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Selain itu sebagai implikasi dari nilai amanah, maka kegiatan produksi harus menggunakan input setempat(*locality*) yang melimpah karena Islam menentang kekayaan material yang tidak termanfaatkan. Sehingga Islam mendorong pemanfaatan potensi alam dan kekayaan semaksimal mungkin (Ash-Shadr, 2008:400). Bahkan didalam (QS,Al-A'raf [7]: 32): sikap tidak memanfaatkan sumber kekayaan alam dan material dipandang sebagai sikap tidak mensyukuri anugerah.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Dalam Islam, permasalahan produksi bukanlah mencari teknologi berproduksi sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimum, melainkan mencari jenis output apa dari berbagai kebutuhan manusia yang bisa diproduksi dengan teknologi yang sudah ada sehingga diperoleh *mashlahah* yang maksimum (P3EI UII Yogyakarta:2008:294). Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan input-input lain. Tidak terpakainya input dalam produksi yang berupa modal tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius. Substitusi yang terjadi antara kapital dan teknologi tidak akan menimbulkan permasalahan, namun ketika substitusi yang terjadi adalah antara tenaga kerja/manusia dan modal maka menimbulkan permasalahan kemanusiaan (P3EI UII,2008:285).

P3EI UII (2008:290) merumuskan fungsi dari penambahan tenaga kerja dan produktivitas rata-rata modal sebagai berikut:

$$Q = f(K, L) \quad (2.3)$$

Dengan ekspresi seperti persamaan (2.2) diatas, maka bisa diperoleh nilai produktivitas rata-rata kapital sebagai berikut:

$$AP_1^k = \frac{1}{K} Q = \frac{1}{K} f(K, L) \quad (2.4)$$

Jika sekarang jumlah tenaga kerja ditambah sebanyak dL menjadi L maka output akan bertambah sebanyak dQ menjadi Q' padahal pertambahan Q sebanyak dQ bisa dilihat melalui cara yang lain yaitu:

$$dQ = \frac{\partial f}{\partial K} dK + \frac{\partial f}{\partial L} dL \quad (2.5)$$

Dalam kasus ini tenaga kerja bertambah sementara jumlah kapital dikekang untuk tidak bertambah ($dK=0$) sehingga persamaan (2.5) akan berubah menjadi:

$$dQ = \frac{\partial f}{\partial L} dL \quad (2.6)$$

Dengan menggunakan persamaan (2.6) kita bisa mendapatkan nilai Q'

$$Q' = Q + dQ$$

$$Q = Q + \frac{\partial f}{\partial L} dL \quad (2.7)$$

Dari persamaan (2.7) diatas maka bisa diperoleh nilai produktivitas rata-rata dari kapital yang baru yaitu:

$$\frac{1}{K} Q' = \frac{1}{K} \left(Q + \frac{\partial f}{\partial L} dL \right) \quad (2.8)$$

$$\frac{1}{K} Q' = \frac{1}{K} Q + \frac{1}{K} \frac{\partial f}{\partial L} dL$$

Hasil ekspresi (2.8) diatas bisa ditulis kembali menjadi:

$$AP_2^k = AP_1^k + \frac{1}{K} \frac{\partial f}{\partial L} dL \quad (2.9)$$

Dari persamaan diatas bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan produktivitas kapital dari yang semula(sebelum terjadinya penambahan jumlah tenaga kerja). Namun, sekaligus bisa dilihat adanya kenyataan bahwa kenaikan produktivitas kapital rata-rata ini berasal dari penambahan tenaga kerja, dL pada terma kedua diruas kanan dalam persamaan 2.9. Ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja disatu pihak akan menurunkan nilai produk marginal fisik tenaga kerja tetapi disisi lain justru meningkatkan nilai produktivitas rata-rata kapital. Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan produktivitas rata-rata kapital tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kenaikan jumlah tenaga kerja yang mengoperasikan kapital tersebut (P3EI UII, 2008:291). Dengan bertambahnya produktivitas rata-rata dari kapital/modal maka akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

2.7 Telaah Pustaka

Penelitian berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan. Dari semua penelitian terdahulu perbedaan terletak padapenambahan variabel ICOR, pengeluaran pemerintah lebih spesifik kepada belanja modal, metode analisis data yang menggunakan analisis data panel yaitu menggunakan *fixed effect model* (FEM), ukuran variabel independen, letak danperiode penelitian dan kesamaannya terletak pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Secara lebih rinci

maka dibawah ini disajikan tabel penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

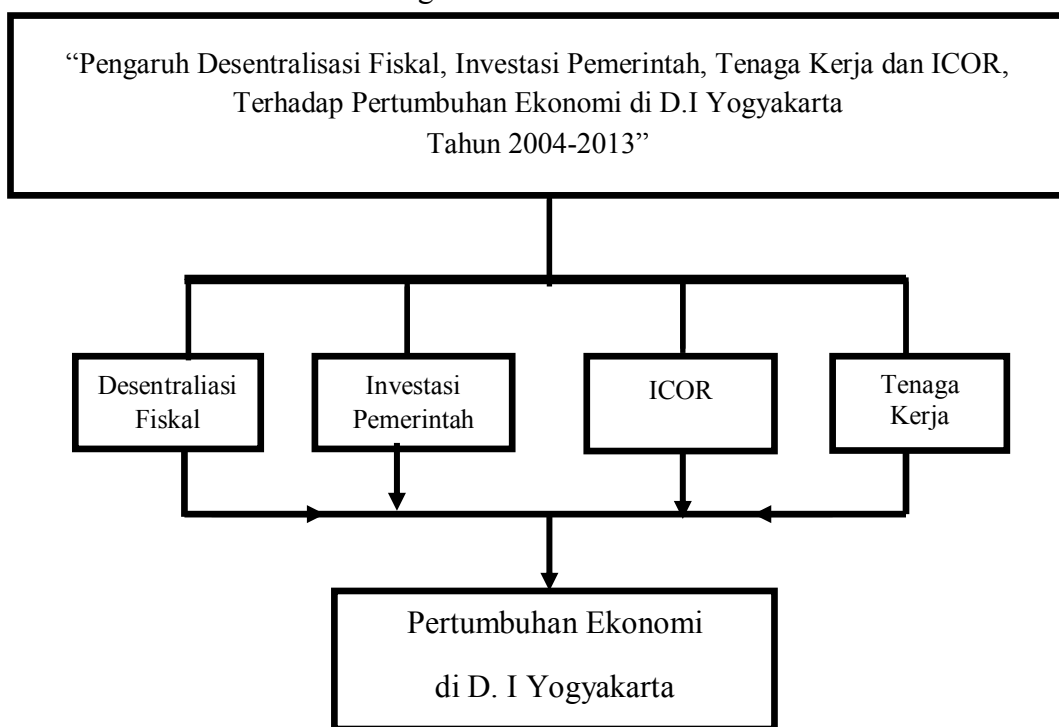
Peneliti/Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel & Alat Analisis	Ringkasan Hasil
Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000)	Jurnal	Fiscal Decentralization and Economic Growth in China.	Variabel dependen: pertumbuhan pendapatan propinsi, Variabel bebas: pertumbuhan tenaga kerja, pajak, derajat keterbukaan ekonomi, tingkat inflasi, investasi. Menggunakan metode OLS	Semakin tinggi Derajat desentralisasi fiskal berhubungan dengan rendahnya Pertumbuhan ekonomi.
Dwi Suryanto (2011)	Skripsi Universitas Diponegoro	Analisis pengaruh tenaga kerja, Tingkat pendidikan, Dan pengeluaran pemerintah Terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten tahun 2004-2008	Variabel dependen : PDRB Variabel bebas: Tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah. Menggunakan metode OLS.	Tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan ekonomidi Subosukawonosraten.
Wiratno Bagus Suryono (2010)	Skripsi Universitas Diponegoro Semarang	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah	Variabel dependen: PDRB. Variabel independen: Tingkat investasi, tenaga kerja dan PAD Metode yang digunakan adalah OLS	Tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB

Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng (2013)	Jurnal Fak. Ekonomi, Jurusan Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado	Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Independen dalam penelitian ini meliputi : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, pengeluaran investasi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS	Pengeluaran konsumsi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota manado
Avanda Fahri Atahrim(2013)	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syarif Hidayatullah.	Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri. Variabel Independen dalam penelitian ini meliputi : Pengeluaran investasi pemerintah dan Tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah REM	Pengeluaran investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

2.8 Kerangka Pemikiran

Merujuk kepada telaah pustaka dan kerangka teoritik yang telah diuraikan, maka secara skematis untuk penelitian ini telah dapat dirancang dengan spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi D.IYogyakarta, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar di atas merupakan kerangka pemikiran penelitian yaitu gambaran secara umum tentang mekanisme penelitian. Dimana pada tahap pertama, penelitian ini memetakan tentang pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten/Kota D. I Yogyakarta.

Tahap kedua yaitu memasukkan variabel independen (desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR) dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) yang kemudian dianalisis menggunakan data panel. Pada

tahap kedua ini variabel desentralisasi fiskal di analisis menggunakan rumus pendapatan asli daerah tahun terhitung dibagi dengan total penerimaan daerah tahun terhitung. Variabel investasi pemerintah dihitung menggunakan pengeluaran belanja modal terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja, ICOR, dan variabel pertumbuhan ekonomi diambil dari data persentase perubahan/kenaikan PDRB setiap tahun dari tahun 2004-2013 atas harga dasar konstan.

Tahap ketiga yaitu tahap terakhir dari penelitian yang menghasilkan output berupa hasil perhitungan dari tahap ketiga disertai uraian argumentasi perhitungan.

2.9 Hipotesis

Berdasarkan pemikiran yang bersifat teoritis dan mengacu pada studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin besar tingkat derajat desentralisasi fiskal di suatu wilayah akan semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin besar nilai pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran modal dan tenaga kerja juga akan meningkatkan produktivitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil ICOR juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan hubungan antara variabel independen (desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR) dengan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) sebagai dasar hipotesis.

2.9.1 Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian setiap daerah, daerah diberi kewenangan mengatur daerahnya sendiri lewat

kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah dan dengan penerimaan daerah tersebut pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengalokasikan dana yang ada untuk pencapaian kesejahteraan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut dapat digunakan dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran publik ke sektor yang menjadi sektor potensial di daerah otonomi sehingga efek dinamisnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Suryono (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah” menunjukkan hubungan yang positif antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

Terkait hal ini maka muncul hipotesa:

Ha1: ada pengaruh yang positif dan signifikan dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.9.2 Hubungan Investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Teori Harrold Domar, Musgrave & Rostow, modal adalah faktor produksi yang merupakan komponen penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Pembentukan modal menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi karena adanya akumulasi modal dapat memberikan dorongan peningkatan output dan pendapatan dimasa yang akan datang.

Investasi pemerintah yang dapat dilihat dari jumlah belanja modal yang digunakan untuk menyediakan infrastruktur, dan juga berupa pengeluaran yang

bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik/investasi pembangunan. Dengan adanya investasi yang dilakukan pemerintah tersebut mempunyai peranan dan fungsi yang cukup besar dalam mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan dan tujuan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, sehingga PDRB akan meningkat.

Penelitian Atahrim (2013) berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah” menyimpulkan setiap pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor lainnya konstan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengeluaran yang berupa investasi yang dilakukan pemerintah, di mana investasi yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dihasilkan atas pengeluaran dana pemerintah.

Dari argumen di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: ada pengaruh yang positif dan signifikan dari investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.9.3 Hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dalam produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori Neo klasik yang diperkuat oleh hukum Okun menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi selain modal, dan teknologi.

Penelitian Suryanto (2011) berjudul “Analisis pengaruh tenaga kerja, Tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah Terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten tahun 2004-2008” menyimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor lainnya konstan. Hal ini sejalan dengan Teori Neo Klasik dan hukum Okun yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat dari jumlah tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin banyak tenaga kerja maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari argumen di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3:ada pengaruh yang positif dan signifikan dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

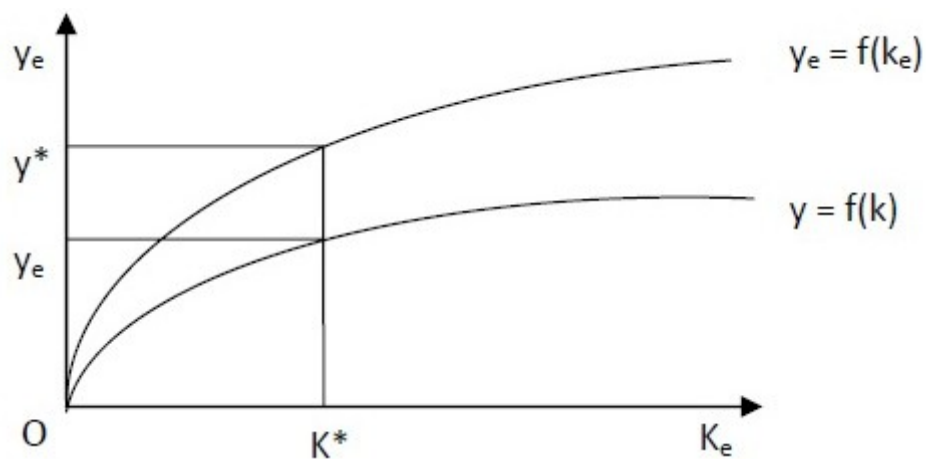
2.9.4 Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kuznetz (dalam Adisasmito, 2013: 104) pendapatan modal dapat digambarkan menggunakan nilai ICOR yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo Klasik pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya teknologi, penggunaan input akan lebih efisien.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang dilihat dari besaran ICOR dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal sehingga nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil angka ICOR maka teknologi yang digunakan semakin meningkat dan berefek pada semakin efisiennya penggunaan modal dan demikian sebaliknya. Pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini

Gambar 2.3

Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Todaro 2006

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : ada pengaruh yang negatif dan signifikan dari ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan dan penelitian dokumenter. Berdasarkan tujuannya penelitian terapan berusaha untuk menerapkan teori- teori yang yang paling tepat dan relevan. Sedangkan jenis penelitian dokumenter merupakan penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari bahan dokumentasi institusi (Supardi, 2005: 34). Disamping itu, penelitian ini juga bersifat kuantitatif yang menekankan pada analisis data numerik yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2005: 5).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2010: 66). Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh data tentang desentralisasi fiskal, Investasi pemerintah, tenaga kerja, ICOR dan pertumbuhan ekonomi di lima Kabupaten/Kota D. I Yogyakarta.

Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi (Indrianto dan Supomo, 2011: 115). Sampel dapat diidentifikasi sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010: 66). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data tentang pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah, belanja

modal, tenaga kerja, ICOR dan pertumbuhan ekonomi di lima Kabupaten/Kota D. I Yogyakarta periode 2004-2013.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel yang bersifat terikat, besarnya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independent merupakan variabel yang bersifat tidak terikat atau bebas, dimana besarnya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukurnya (Sularso, 2003:50). Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), sedangkan variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini antara lain: Desentralisasi fiskal (DF), Investasi Pemerintah (IP), Tenaga Kerja (TK) dan ICOR.

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan Ekonomi regional (PDRB), berarti perkembangan kegiatan ekonomi daerah dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat daerah meningkat. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diperoleh dari peningkatan PDRB tiap kabupaten pada tahun 2004- 2013, bersumber dari kantor BPS setiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dan dinyatakan dalam bentuk persen. Nilai pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dari:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Dimana:

$PDRB_t$: Pertumbuhan ekonomi daerah tahun terhitung

$PDRB_{t-1}$: Pertumbuhan ekonomi tahun sebelum

3.3.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal (DF) adalah rasio Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Pendapatan Daerah setiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta yang tertuang dalam Realisasi APBD tiap kabupaten di D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013. Bersumber dari kantor BPS tiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dan dinyatakan dalam bentuk persen. Nilai desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dari:

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal} = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\% \quad (3.2)$$

Dimana:

PAD_t : Pendapatan Asli Daerah tahun terhitung

$PDRB_t$: Pertumbuhan ekonomi tahun terhitung

3.3.3 Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah (IP) adalah rasio jumlah belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam publikasi realisasi APBD. Dalam penelitian ini investasi pemerintah diperoleh dari rasio pengeluaran investasi pemerintah terhadap PDRB di kab/kota di D.I Yogyakarta tahun 2004-2013. Bersumber dari Kantor BPS tiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dan dinyatakan dalam bentuk persen. Nilai investasi pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dari:

$$\text{Investasi Pemerintah} = \frac{BM_t}{PDRB_t} \times 100\% \quad (3.3)$$

Dimana:

BM_t : Belanja modal tahun terhitung

$PDRB_t$: Pertumbuhan ekonomi tahun terhitung

3.3.4 Tenaga Kerja

Tenaga kerja (TK) adalah jumlah individu daerah penelitian yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu di Kab/Kota Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2004–2013. Bersumber dari kantor BPS tiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dan dinyatakan dalam bentuk satuan (Jiwa).

3.3.5 ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran tambahan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output. Bersumber dari kantor BPS tiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dan Bappeda D.I Yogyakarta, dinyatakan dalam bentuk poin. Nilai ICOR yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dari:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (3.4)$$

Dimana:

ΔK : investasi atau penambahan modal baru

ΔY : pertambahan output

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik D. I Yogyakarta (D.I Yogyakarta Dalam Angka), BPS setiap Kabupaten di D.I Yogyakarta yaitu: Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul, BAPPEDA D.I Yogyakarta dan situs-situs yang menyajikan data-data pertumbuhan ekonomi D. I Yogyakarta, Investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR di D.I Yogyakarta dan dilengkapi dengan data yang berasal dari *Website* Sistem Informasi Data BAPPEDA.

Penelitian ini dilakukan di D.I Yogyakarta, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (tahun 2004-2013), pemilihan Yogyakarta sebagai objek penelitian karena pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang terus meningkat namun masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, pemilihan periode ini disebabkan karena tahun 2004 adalah tahun dimulainya otonomi daerah. Menurut data BPS (2013: 71), pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000. Dalam penelitian ini digunakan juga data setiap kabupaten/kota yang beradadi Provinsi D.I Yogyakarta.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu: pertama, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang Pertumbuhan ekonomi, Investasi pemerintah, tenaga kerja dan juga ICOR di 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Data tersebut merupakan data

sekunder yakni data yang diperoleh ataupun telah diolah pihak lain yaitu instansi/lembaga. Kemudian oleh penulis diambil untuk dijadikan objek atau bahan penulisan dalam pelaksanaan pembuatan tugas akhir.

Kedua, metode kepustakaan/*literature* digunakan untuk melancarkan kegiatan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian maupun data-data yang didapat dari internet serta buku-buku dan *literature* yang mendukung dan menjelaskan teori-teori dalam penelitian ini.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data panel dimana analisis data panel ini adalah kombinasi antar deret waktu (*time series data*) dan deret hitung (*cross section data*). Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika. Pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan *software* Eviews 6 dan uji statistik.

Model yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah model yang pernah digunakan oleh Jin dan Zou (2000), maka model yang dibentuk adalah:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 IP_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 ICOR_{it} \mu_{it} \quad (3.5)$$

Dimana:

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

i = Kabupaten/Kota (1,...,5)

t = Waktu (2004,...,2013)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_n$ = Koefisien regresi

DF = Desentralisasi Fiskal

IP = Investasi Pemerintah

TK = Tenaga Kerja

ICOR = ICOR

μ = Variabel Pengganggu

Analisis data menggunakan regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan (Ajija, 2011: 52) yaitu :

1. Panel data memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study dinamic of adjusment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of fredom* = df) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel digunakan untuk mempelajari model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi bahwa tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada model data panel (Ajija, 2011: 52). Secara umum ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu dengan tiga pendekatan (Widarjono, 2009: 231-240).

3.6.1 Pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM)

Model FEM memiliki dua faktor tidak terobservasi yang mempengaruhi variabel tak bebas. Model ini bersifat konstan antarobservasi *cross section* dan konstan antar observasi *time series*. Identifikasi komponen residual spesifik *cross section* dan *time series* yang bersifat konstan, maka dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$y_{it} = a_0 + \sum_{j=1}^k a_j X_{j.it} + \sum_{i=1}^{N-1} D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^T w_t + e \quad (3.6)$$

Dimana D_i^c dan D_t^T adalah variabel dummy sebanyak $N - 1$ dan $T - 1$.

3.6.2 Pendekatan *Random Effects Model* (REM)

Model *random effect* digunakan ketika *unobservasi effect* a_i , dapat diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas, berikut adalah model persamaannya:

$$Cov(v_{itj}, a_i) = 0, t = 2, \dots, T; j = 1, 2, \dots, k \quad (3.7)$$

Dari persamaan (3.7) dapat diturunkan dengan menggunakan *composite error term* sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + v_t \quad (3.8)$$

Pemilihan FEM dan REM didasarkan pada apakah heterogenitas bersifat random atau konstan. Hausman (Doddy, 2012: 150-151), mengajukan suatu tes

yang menggunakan REM sebagai acuan hipotesis null. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji adanya hubungan antara α_i dan x_{itj} . Apabila statistik uji menunjukkan penolakan hipotesis null, maka FEM adalah lebih tepat, begitu sebaliknya.

3.6.3 Pendekatan *Common Effect*

Model *common effect* atau sering disebut dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) merupakan metode pendekatan yang tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam kurun waktu. Dengan demikian pada teknik *common effect* ini maka model persamaan regresinya seperti dalam persamaan sebagai berikut: (Widarjono, 2013).

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + e_{it} \quad (3.9)$$

3.7 Teknis Analisis Data

Ada dua pendekatan yang sering digunakan dalam regresi data panel yaitu pendekatan *fixed effect* model dan *random effect* model (Ajija, 2011: 52). Sedangkan untuk menentukan model mana yang akan dipakaidapat dilakukan dengan uji spesifikasi model. Berikut adalah uji spesifikasi model untuk menentukan model data panel.

3.7.1 Uji Spesifikasi Model

Pertama, Uji *Chow* digunakan untuk membandingkan apakah model bersifat *fixed effect* atau *common effect*, jika nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *fixed effect* dan

sebaliknya bila lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *common effect*.

Kedua, Uji *Hausman* digunakan untuk memilih apakah model itu *fixed effect* atau *random effect*. Hausman Test dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : Model *Random Effect*

H1 : Model *Fixed Effect*

Sebagai dasar penolakan Hipotesa Nol maka digunakan *Statistik Hausman* dan membandingkan dengan *Chi-Square*. Jika nilai m hasil pengujian lebih besardari χ^2 -tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Ketiga, Uji *Langrange Multiplier* digunakan untuk memilih antara *commont effect* dan *random effect*.

Mekanisme uji untuk menentukan pemilihan model data panel yang tepat dimulai dengan cara uji *Chow* untuk membandingkan metode pendekatan *common effect* dengan pendekatan *fixed effect* terlebih dahulu. Jika hasil yang diperoleh menunjukkan pendekatan *commen effect* yang diterima, maka metode pendekatan *common effect* yang dianalisa. Jika metode pendekatan *fixed effect* yang diterima, maka dilakukan uji *hausman* untuk membandingan dengan metode pendekatan *random effect*. Apabila hasil yang diperoleh menunjukkan pendekatan *fixed effect* maka metode yang tepat digunakan dalam regresi data panel adalah pendekatan *fixed effect*.

3.7.2 Pengujian Hipotesis

3.7.2.1 Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen (secara simultan atau bersama-sama) terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai α (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas atau signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak
- b. Jika nilai probabilitas atau signifikansi $> \alpha$ maka H_0 diterima

3.7.2.2 Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X_1 , X_2 , X_3 , berpengaruh signifikan terhadap Y . Menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$ dan dengan df (n-k). Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

1. $H_0: \beta_i \leq 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. $H_a: \beta_i > 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen (Sarwoko, 2005: 60).

3.7.2.3 Koefisien Determinasi R^2 (Goodness Of Fit)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel X yang mempunyai pengaruh linier terhadap variasi (naik turunnya) Y . Sifat-sifat R^2 yaitu nilainya selalu non negatif, sebab rasio dua jumlah kuadrat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu

atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Makin besar nilai R^2 maka makin tepat atau cocok suatu garis regresi, sebaliknya makin kecil R^2 maka makin tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi (Supranto, 2005: 77).

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Provinsi D.I Yogyakarta dengan luas wilayah $3185,80 \text{ km}^2$, terletak diantara $7033'$ Lintang Utara dan $8012'$ Lintang Selatan serta $110000'$ dan $110050'$ Bujur Timur. D.I Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah propinsi Jawa Tengah yang meliputi:

Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut

Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara

Kabupaten Purworejo di sebelah Barat

Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Secara administratif terbagi dalam 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan serta 438 Desa/Kelurahan definitif (DIY Dalam Angka, 2015: 87-88). Luas wilayah D. I Yogyakarta adalah $3185,80 \text{ km}^2$ atau sekitar 0,17% dari luas wilayah Indonesia serta 0,24% dari luas wilayah Pulau Jawa. Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar $1.485,36 \text{ km}^2$ atau 46,63% dari seluruh luas wilayah Propinsi D.I Yogyakarta sedangkan yang paling kecil adalah Kota Yogyakarta dengan luas wilayah $32,50 \text{ km}^2$ atau sekitar 1,02% dari luas wilayah Provinsi (DIY Dalam Angka, 2015: 67).

Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta sebanyak 3.594.854 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,40% dan penduduk perempuan 50,60% (BPS DIY Dalam Angka, 2013: 63).

4.1.2 Gambaran Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta salah satunya dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDRB dihitung dari nilai PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan tahun 2000. Dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK) karena pertumbuhan PDRB (ADHK) lebih bisa menggambarkan pertumbuhan yang sebenarnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan atas dasar harga berlaku (ADHB). Pertumbuhan PDRB (ADHK) menggunakan harga tetap dari tahun ke tahun sehingga perubahan harga tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Secara rinci pertumbuhan PDRB (ADHK) di Provinsi D.I Yogyakarta selama lima tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di D. I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2000, Periode 2010-2013 (%)

Tahun	Kota	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul	DIY
2010	4,98	4,49	4,97	3,06	4,15	4,32
2011	5,64	5,19	5,27	4,95	4,33	5,08
2012	5,76	5,45	5,34	5,01	4,84	5,28
2013	5,64	5,70	5,57	5,05	5,02	5,43
Rata-Rata	5,30	5,06	5,12	4,30	4,52	4,87

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi D. I Yogyakarta selama kurun waktu (2010-2013) mencapai 4,87%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta mencapai 5,43% yang

berarti bahwa kinerja perekonomian D.I Yogyakarta mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5.28%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota selama lima tahun terakhir yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 5,30%, Kabupaten Sleman 5,06%, dan Kabupaten Bantul 5,12%. Sebaliknya Kabupaten Kulon Progo 4,30% dan Kabupaten Gunungkidul 4,52% berada di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi D. I Yogyakarta.

4.1.3 Desentralisasi Fiskal

Perkembangan desentralisasi fiskal dilihat dari rasio Penerimaan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai representasi kemandirian daerah.

Tabel 4.2 Derajat Desentralisasi Fiskal di D. I Yogyakarta
Menurut Kabupaten/Kota ADHK 2000, Periode 2010-2013 (%)

Tahun	Kota	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul
2010	22,00	14,91	11,81	7,61	5,45
2011	22,26	17,29	10,92	6,79	4,98
2012	26,98	11,19	12,46	8,39	5,50
2013	29,25	14,81	14,75	21,26	5,69
Rata-Rata	25,12	14,55	12,49	11,01	5,41

Sumber: Data diolah (2016)

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal (DF) yang dapat dicapai oleh 5 kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Meski secara keseluruhan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2013,data tersebut medeskripsikan bahwa pemerintah daerah belum stabil dankonsisten dalam menciptakan kemandirian bagi daerahnya

masing-masing dan adanya *gap* antara masing-masing wilayah. Selain itu dari data tersebut juga terlihat bahwa jumlah PAD di D.I Yogyakarta relatif rendah, hal ini memperlihatkan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memacu kegiatan pembangunan.

Pada Tabel 4.2 juga dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal (DF) tertinggi adalah Kota Yogyakarta dengan rata-rata DF sebesar 25,12%, yang kedua adalah Kabupaten Sleman dengan rata-rata DF sebesar 14,55%, kemudian Bantul dengan rata-rata DF sebesar 12,49%, diikuti Kulon Progo dengan rata-rata DF sebesar 11,01% dan yang terakhir adalah Kabupaten Gunungkidul dengan rata-rata DF hanya sebesar 5,41%.

4.1.4 Investasi Pemerintah

Perkembangan Investasi pemerintah dilihat dari rasio belanja modal terhadap PDRB, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Investasi Pemerintah di D. I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota ADHK 2000, Periode 2010-2013 (%)

Tahun	Kota	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul
2010	0,98	1,03	3,10	5,93	5,71
2011	1,23	1,43	2,86	7,91	5,16
2012	0,14	2,57	3,18	6,28	0,10
2013	0,25	2,70	3,95	1,58	4,69
Rata-rata	0,65	1,93	3,27	5,42	3,92

Sumber: Data diolah (2016)

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Investasi pemerintah (IP) yang dapat dicapai oleh 5 kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Dari data tersebut juga dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki Investasi pemerintah (IP) tertinggi adalah Kulon Progo dengan

rata-rata IP sebesar 5,42%, yang kedua adalah Gunungkidul dengan rata-rata IP sebesar 3,92%, kemudian Bantul dengan rata-rata IP sebesar 3,27%, diikuti Sleman dengan rata-rata IP sebesar 1,93% dan yang terakhir adalah kota dengan rata-rata IP hanya sebesar 0,65%.

Porsi belanja modal pemerintah di Kulon Progo dan Gunungkidul yang lebih besar dari Kota, Sleman dan Bantul berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh kedua Kabupaten tersebut. Bisa dilihat di Tabel 4.1 bahwa Kabupaten Kulon Progo 4,30% dan Kabupaten Gunungkidul 4,52% berada di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta.

4.1.5 Tenaga Kerja

Pada dasarnya tenaga kerja merupakan modal utama dalam proses pembangunan. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(BPS, 2014:64) mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2013 sebanyak 89.418 orang, meningkat sekitar 2,14 % dibanding tahun sebelum 2012 yang sebesar 87.541 orang. Menurut jenis kelamin, laki-laki 49,65 % dan 50,35 % perempuan. Dari jumlah tersebut berpendidikan SD sebesar 1,55 %, SLTP sebesar 3,95 %, berpendidikan SLTA sebesar 30,79, sebanyak 14,23 % Diploma I-III, 47,85 % Diploma IV-S1, serta 1,63 % S2-S3. Dari total pencari kerja, persentase lowongan pekerjaan yang tersedia sebanyak 16,19 % dan penempatan sebesar 14,32 %.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013, persentase penduduk D.I Yogyakarta umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 69,29% merupakan angkatan kerja terdiri dari 67,05% bekerja dan 2,25% pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja sebesar 30,71% yaitu berstatus sekolah 7,17%, mengurus

rumah tangga 17,03% dan lainnya 6,51%. Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 28,18%, perdagangan 25,87%, jasa 19,93%, industri pengolahan 13,36% dan sektor-sektor lainnya 12,66% (BPS DIY Dalam Angka, 2014: 64). Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan tenaga kerja menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota di D. I Yogyakarta, 2010-2013 (%)

Tahun	Kota	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul	DIY
2010	1,00	3,21	1,49	-3,53	-2,83	-0,13
2011	0,98	-0,01	0,94	0,32	-0,01	0,44
2012	0,42	0,63	1,34	0,43	0,85	0,73
2013	2,74	2,53	2,50	0,93	0,59	1,86
Rata-Rata	1,22	1,59	1,45	-1,85	0,004	0,78

Sumber: Data diolah (2016)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tenaga kerja di D.I Yogyakarta pada tahun 2013 secara rata-rata mengalami *trend* peningkatan. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan tenaga kerja di D.I Yogyakarta meningkat sebesar 1,13%. Namun data diatas juga memperlihatkan bahwa di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul jumlah tenaga kerja terserap sampai tahun 2013 menduduki posisi dua terendah di Provinsi D.I Yogyakarta.

4.1.6 ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Berikut

adalah tabel tentang nilai ICOR menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta:

Tabel 4.5 Nilai ICOR di DIY menurut Kabupaten/Kota
di D.I Yogyakarta, 2010-2013

Tahun	Kota	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul	DIY
2010	4,88	9,72	6,58	5,10	5,84	6,43
2011	4,26	8,53	6,08	3,31	5,46	5,53
2012	4,25	7,62	6,06	3,49	5,03	5,29
2013	4,24	7,46	5,73	3,51	4,63	5,11
Rata-Rata	4,65	8,72	6,41	3,90	5,20	5,78

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa tahun 2010-2013 nilai ICOR D.I Yogyakarta per tahun di atas 5%-6%. Pola yang sama ditunjukkan oleh nilai rata-rata ICOR selama periode pengamatan, dimana Kabupaten Sleman mempunyai nilai rata-rata ICOR tertinggi sebesar 8,72%; Kabupaten Bantul 6,41%; Kabupaten Gunung Kidul 5,20%; Kota Yogyakarta 4,65%; dan terendah Kabupaten Kulonprogo sebesar 3,90%. Hal ini berarti kegiatan penanaman modal/investasi di Provinsi D.I Yogyakarta dapat dikatakan relatif sejalan dengan nilai ICOR Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Namun meski mengalami tren penurunan yang berarti semakin efisiennya penggunaan modal/investasi, nilai capaian ICOR di D.I Yogyakarta masih tergolong cukup tinggi yaitu di atas 4 %.

4.2 Analisis Regresi Data Panel

4.2.1 Uji Spesifikasi Model

4.2.1.1 Hasil Uji Chow

Metode ini membandingkan apakah model bersifat *fixed effect* atau *common effect*, dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : *Pool Least Square*

H1 : Model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil estimasi *Pool Least Square* dan metode *Fixed Effect* diperoleh F-statistik sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4,962130	4,41	0,0023
Cross-section Chi-square	19,740770	4	0,0006

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas PLS (*pool least square*) sebesar 0,0006 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Oleh karena itu H₀ ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan *fixed effect* lebih baik dibandingkan pendekatan *pool least square*

4.2.1.2 Hasil Uji Hausman

Hausman Test digunakan untuk memilih apakah model itu *fixed effect* atau *random effect*. *Hausman test* dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀ : Model *Random Effect*

H₁ : Model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil estimasi Model *Random Effect* dan metode *Fixed Effect* diperoleh F-statistik sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.848519	4	0.0005

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas FEM sebesar 0,0005 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Oleh karena itu H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan *fixed effect* lebih baik dibandingkan pendekatan *random effect*.

4.2.2 Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Berikut adalah hasil estimasi *Fixed effect*:

Tabel 4.9 Hasil Estimasi *FixedEffect*

Variabel	Tahun 2004-2013
DF	0.056976
IP	0.038799
TK	0,000011
ICOR	-0.423659
R-square	0,572181

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

1. Koefisien dari derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,056976 dan bernilai positif maka peningkatan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Artinya, setiap peningkatan

derajat desentralisasi fiskal sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta sebesar 0,056976persen.

2. Koefisien investasi pemerintah sebesar 0.038799 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Artinya, setiap ratio investasi pemerintah terhadap PDRB meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta sebesar 0,038799 persen.
3. Koefisien tenaga kerja sebesar 0,000011 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Jika tenaga kerja naik sebesar 1 jiwa, maka pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta akan naik sebesar 0,000011 persen.
4. Koefisien ICOR sebesar -0,423659 dan nilai tersebut adalah negatif. Maka setiap peningkatan efisiensi lewat penurunan ICOR sebesar 1 poin maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta sebesar 0,423659 persen.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen (secara simultan atau bersama-sama) terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai α (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas atau signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak
- b. Jika nilai probabilitas atau signifikansi $> \alpha$ maka H_0 diterima

Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik F

Indikator	Nilai
Prob(F-statistic)	0,000011

Sumber: Data diolah (2016)

Pada tabel 12. menunjukkan probabilitas atau signifikansi dari statistik F sebesar $0,000011 < 0,05$, oleh karena itu H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

4.3.2 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dikatakan signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05.

Tabel 4.11 Hasil Output Uji Statistik

Variabel Bebas	t Statistik	Probabilitas	Kesimpulan
DF	2.072868	0,0445	Signifikan
TK	3.518731	0,0011	Signifikan
IP	0.769736	0,4459	Tidak Signifikan
ICOR	-4.313111	0,0001	Signifikan

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen kecuali investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Hal ini dikarenakan semua variabel independen nilai probabilitas kurang dari 0,05.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya, sedangkan nilai diluar koefisien determinasi ($1-R^2$) dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai R^2 sebesar 0,572181. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 57,21% sedangkan 42,78 % sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa estimasi yang dihasilkan cukup baik untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta tahun 2004-2013. Hal ini dikarenakan seluruh variabel independen kecuali Investasi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun pembahasan secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

Wanger dalam Mangkusubroto (1998) mengemukakan teori yang dikenal dengan hukum Wanger yaitu dalam sebuah perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dari hukum tersebut maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang saling terkait dan tarik menarik antara pendapatan perkapita dengan pengeluaran pemerintah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan asumsi pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa saat pendapatan perkapita masyarakat naik maka akan meningkatkan penerimaan daerah (sebagai indikator desentralisasi fiskal) dan akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan melihat rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Penerimaan Daerah (TPD). Prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap TPD menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Selain itu, adanya perkembangan peningkatan pendapatan dari pos PAD di suatu daerah, juga dapat memberikan gambaran bahwa daerah tersebut memiliki kinerja fiskal yang semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur dari tingkat derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta periode 2004-2013 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,056976. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jing Jin & Heng fu Zou (2000) dimana dalam penelitian yang mereka lakukan desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri memberikan hasil yang baik di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya wewenang dalam menggali dan mengelola sumber penerimaan daerah kepada daerah itu sendiri maka terjadi efisiensi dalam penggunaannya, dimana pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari sektor-

sektor potensial yang ada di daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari PAD di D.I Yogyakarta masih dapat meningkat selama tidak memberatkan masyarakat dan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dirasakan membantu masyarakat. Ketika memberatkan masyarakat maka pendapatan pemerintah akan turun dan dampaknya belanja pemerintahpun akan menurun.

4.4.2 Pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran untuk pembangunan (belanja modal) yang bersifat menambah modal di masyarakat dimana pengeluaran tersebut berbentuk prasarana fisik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta dengan koefisien regresi sebesar 0.038799.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Harold Domar, Musgrave & Rostow yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suryanto (2010) dan Hadji (2013) dimana pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, Investasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Alasan yang menyebabkan mengapa Investasi pemerintah di D.I Yogyakarta tidak berdampak signifikan, yaitu disebabkan oleh tidak sejalannya kenaikan pendapatan daerah

dengan kenaikan pengeluaran modal yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya pengeluaran investasi pemerintah yang bersifat pengeluaran pembangunan masih mendapat porsi yang cukup sedikit dari penerimaan daerah. Dari data yang bersumber dari BPS provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2005-2013, rata-rata pengeluaran investasi pemerintah hanya sebesar 12,12% dari total penerimaan daerah (TPD). Pengeluaran pemerintah selama periode penelitian lebih banyak dikeluarkan pada belanja pegawai dan juga belanja barang dan jasa tanpa belanja modal yang cukup.

Selain tidak sebandingnya investasi pemerintah dengan penerimaan daerah, alasan yang menyebabkan investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta adalah kemampuan kabupaten dan kota di D.I Yogyakarta yang berbeda-beda dalam mengelola pengeluaran pemerintah yang menyebabkan tidak efektifnya pengeluaran investasi pemerintah dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul mempunyai rata-rata belanja pembangunan terbesar dibanding dengan Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota sebesar masing-masing 5,42% dan 3,92% pada tahun 2010-2013 namun secara bersamaan Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi D. I Yogyakarta dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,30% dan 4,52%.

Masih rendah dan tidak efektifnya pengeluaran investasi pemerintah tidak akan mampu menaikkan pembangunan infrastruktur, padahal infrastruktur merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus pendorong kesejahteraan rakyat.

4.4.3 Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta tahun 2004-2013 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,000011.

Hasil signifikan dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta dikarenakan faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pembangunan. Dari segi jumlah, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi biasanya akan semakin tinggi pula produksi dari kegiatan tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian. Hal ini tercermin dari nilai PDRB D.I Yogyakarta yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori hukum Okun yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan pertumbuhan output (GNP), artinya apabila laju pertumbuhan ekonomi naik maka meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja atau mengurangi pengangguran sebaliknya jika laju pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif akan diikuti oleh pengangguran yang meningkat.

Diperkuat oleh Prasetyo dan Firdaus (2009) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia” yang menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia mayoritas ditunjang oleh sektor padat karya sehingga perlu upaya dari pemerintah maupun swasta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan) membawa dampak positif terhadap angkaproduksi,

bahkan akan lebih besar jika terus bertambahnya manusia demimenunjang perkembangan berkelanjutan dalam pembangunan dari segiketrampilan dan pengetahuan sehingga terciptanya kualitas modal manusiabaik tenaga kerja terampil dan terlatih yang bisa memanfaatkan barang-barangmodal secara efektif yang kemudian bisa meningkatkan produktivitas.

4.4.4 Pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi.

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta tahun 2004-2013 secara langsung berpengaruh signifikan dan negatif, yang artinya bahwa peningkatan efisiensi lewat penurunan ICOR sebesar 1 poin maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta sebesar 0,33 poin.

Hasil regresi pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta sesuai dengan teori Harrold Domardan Neo Klasik bahwa teknologi berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana dengan adanya kemajuan teknologi maka akan membuat penggunaan input/investasi menjadi lebih efisien. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Situmorang (2010) yang menyatakan bahwa ICOR berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari nilai ICOR di D. I Yogyakarta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, ketika ICOR turun maka

pertumbuhan ekonomi meningkat, begitu juga sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan ICOR pada tahun 2009 menjadi 7,28 kemudian berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sebesar 4,85% menjadi 4,30%. Dan pada tahun 2010-2013 terjadi penurunan nilai ICOR yang semula sebesar 6,43 menjadi 5,11 di tahun 2013 yang kemudian meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 4,32% menjadi 5,43% pada tahun 2013.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013 maka kesimpulan yang dapat penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Faktor desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,056976 dengan probabilitas sebesar 0,0445 yang lebih kecil dari α (0,05). Artinya, setiap kenaikan derajat desentralisasi fiskal sebesar 1 persen maka akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,056976 persen.
2. Faktor investasi pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,4459 yang lebih besar dari α (0,05). Penyebabkan investasi pemerintah di Provinsi D.I Yogyakarta tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kenaikan pendapatan daerah dengan kenaikan pengeluaran modal yang dilakukan oleh pemerintah tidak sejalan. Dimana pengeluaran investasi pemerintah masih mendapat porsi yang cukup sedikit dan besaran kenaikan

investasi pemerintah tidak sebanding dengan kenaikan penerimaan daerah. Pengeluaran pemerintah selama periode penelitian lebih banyak dikeluarkan pada belanja pegawai tanpa belanja modal yang cukup. Rendahnya rasio pengeluaran investasi pemerintah maka tidak akan mampu menaikkan pembangunan infrastruktur, padahal infrastruktur merupakan pendorong terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Faktor tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.000011 dengan probabilitas sebesar 0,0011 yang lebih kecil dari α (0,05). Artinya, setiap kenaikan tenaga kerja sebesar 1 jiwa maka akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000011 persen.
4. Faktor ICOR mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomidi Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2004-2013. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,0423659 dengan probabilitas sebesar 0.0001 yang lebih kecil dari α (0,05). Artinya, setiap penurunan ICOR sebesar 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0423659 persen.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Diantaranya:

1. Data yang didapat dari badan terkait penelitian seringkali *inkonsisten* dalam penyajiannya yaitu menunjukkan angka yang berbeda sehingga menyulitkan peneliti untuk menentukan data mana yang akan digunakan dalam penelitian.

2. Periode waktu yang digunakan hanya 10 tahun yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, karena data dalam penelitian pada tahun 2014 dan 2015 masih bersifat sementara dan sangat sementara.
3. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas pada pengaruh desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi, masih banyak faktor lain yang dapat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masih perlu dibutuhkan studi lanjut dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, tenaga kerja dan ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penulis sampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota (terutama di Gunungkidul dan Kulon Progo) serta Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta diharapkan bisa memaksimalkan dalam menggali dan mengolah serta mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial dalam upaya untuk meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya

penerimaan asli daerah akhirnya bisa meminimalkan bantuan dari pemerintah pusat sehingga implementasi desentralisasi fiskal dapat berjalan sesuai tujuan dan hakikat dari desentralisasi itu sendiri.

2. Kebijakan dalam peningkatan PAD sebaiknya tidak memberatkan masyarakat dan pungutan yang diperoleh juga sebaiknya didukung oleh pengeluaran pemerintah yang tepat dan dengan sasaran pada sektor-sektor yang potensial sehingga terjadi efisiensi pengeluaran di daerah serta menunjang produktivitas dan nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta untuk lebih meningkatkan investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran produktif dan bersifat pembangunandengan cara memperbesar belanja modal didalam APBD.Dengan potensi D.I Yogyakarta yang melimpah, nilai investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal menjadi perlu untuk ditingkatkan agar perkembangan kegiatan ekonomi di lingkup Provinsi D.I Yogyakarta meningkat karena dengan perkembangan di sektor perekonomian, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
4. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka perlu adanya langkah dari pemerintah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta (terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo) dalam upayanya untuk menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan

produktivitas tenaga kerja itu sendiri yang nantinya akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

5. ICOR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Namun di D.I Yogyakarta nilai ICOR tergolong cukup tinggi yang berarti efisiensi penggunaan modal dalam produksi masih rendah dan masih perlu untuk ditingkatkan karena ICOR yang rendah akan menyebabkan penggunaan modal menjadi lebih efisien. Dengan nilai ICOR yang masih tinggi maka diharapkan peran pemerintah dalam meningkatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin lebih jauh dalam melakukan penelitian lanjutan tentang pertumbuhan ekonomi, agar menggunakan data yang lebih mencerminkan keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan menambah variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti variabel konsumsi, tabungan, investasi swasta dan jumlah ekspor dan impor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi 2002), Jakarta: Al Huda Gema Insani.

Buku

Abdul-karim, Adiwarman. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ash Shadr, Muhammad Baqir. (2008) *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.

Abdullah, Abdul Husain at-Tariqi.(2004).*Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press.

Agus Widarjono. (2009). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi, untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.

Ajija, Shochrul R, Dyah W. Sari, Rahmat H. Stianto, Martha R. Primanti. (2011).*Cara Cerdas Menguasai Eviews*.Jakarta: Salemba Empat.

Arsyad, Lincoln.(1999). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIE.

Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*,Yogyakarta; Graha Ilmu.

Chapra, M. Umar. (2000).*Islam dan Pembangunan ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Chapra, M. Umar. (2000).*Islam dan tantangan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Damarik,Khairul I.*Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Obor.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Konsep Ketenagakerjaan*. Jakarta:

Disnakertrans, 2006.

Dornbush, Rudiger.(2006). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

J Supranto. (2005).*Pengantar Statistika*. Jakarta: Salemba Empat.

Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIEYKPN.

Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE

M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus (2011).*Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.

Moch Doddy. A. (2012).*Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, Gregory.(2006).*Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.

Mankiw, Gregory. (2007).*Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, Edisi Keenam.

Nanang, Martono. (2011).*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Naqvi, Syed Nawab Haider. (1981). *Ethics and Economics:An Islamic Synthesis*, The Islamic Foundation, London.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad. (1986).*Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*.Jakarta: LIPPM.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2011).*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.

Prawirosetoto.(2003).*Dua Setengah Tahun Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Mendorong Investasi*.Kongres ISEI. Malang.

P3EI UII. (2008). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada.

- Robinson, Tarigan. (2005). *Ekonomi regional (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Bumi
- Sadeq, Abul Hakim Muhammad. (1991). *Economic Development in Islam*.
Selangor: Pelanduk Publications.
- Sameulson, Paul A dan Wiliam, D Nordhaus.(2001). *MakroEkonomi*. Jakarta:
Erlangga.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan kesembilan. Alfabet,
Bandung.
- Todaro, Michael.(2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
Edisi Ketujuh Penerjemah : Harris Munandar.
- Wijaya, Faried, *Pengantar Ekonomika; Ekonomikamakro*, Yoyakarta: BPFE,
2000
- Woller, Gary M. dan Kerk Phillips.(1998). *Fiscal Decentralization and LDC
Economy Growth: An Empirical Studies*. Department Of Economics.
Brigham Young Unverisity.

Jurnal

- Apriesa, Lintangtia. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus :
Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah" Diponegoro Journal Of Economics
Volume 2, Nomor 1, 2013.
- Asmuni Mth, 2003, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Mawarid Edisi X
Tahun 2003.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz, "Concept of Fiscal Decentralization and
World Wide Overview," World Bank Institute, 2002.
- Jin, Jing dan Heng-Fu Zou. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in
China*. World Bank Working Paper Series. 2000.

Mohammad, *"The Effect Of The Government Investment, Employment, And Fiscal Decentralization On Economic Growth Of Regencies in Indonesia 2007-2010,"* Bappeda Kota Cimahi, 2013.

Novia Hadji, *"Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado,"* Jurnal Fak. Ekonomi, Jurusan Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

Nurman, Muhammad A. *" Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008,"* Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 1 2013.

Riduansyah, Mohammad. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor),* Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, 2003.

Sodik, Jamzani. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan,"* Vol. 12 No.1, April, 2007.

Swaramarinda, Darma Rika Dan Indriani, Susi. *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.* Econosains Universitas Negeri Jakarta Vol. IX, No.2, 2011.

Skripsi

Altito Siagian, 2010, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat),* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Avanda Fahri Atahrim, 2013, *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota*

Di Provinsi Jawa Tengah, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syarif Hidayatullah.

Dwi Suryanto, 2011, *Analisis pengaruh tenaga kerja, Tingkat pendidikan, Dan pengeluaran pemerintah Terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten tahun 2004-2008*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Rifka Kusuwardani, 2010, *Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bandung Tahun 2008-2011*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syarif Hidayatullah.

Wiratno Bagus Suryono, 2010, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Input Data

Badan Pusat Statistik, 2004-2015, *D.I. Yogyakarta Dalam Angka*, BPS DIY.

Badan Pusat Statistik, 2004-2013, *Kota Yogyakarta Dalam Angka*, BPS Kota.

Badan Pusat Statistik, 2004-2013, *Sleman Dalam Angka*, BPS Sleman.

Badan Pusat Statistik, 2004-2013, *Bantul Dalam Angka*, BPS Bantul.

Badan Pusat Statistik, 2004-2013, *Kulon Progo Dalam Angka*, BPS Kulon Progo.

Badan Pusat Statistik, 2004-2013, *Gunungkidul Dalam Angka*, BPS Gunungkidul.

BPS DIY dan Bappeda DIY, 2009, *ICOR Sektor Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2004-2008*, Yogyakarta.

BPS DIY dan Bappeda DIY, 2010, *ICOR Sektor Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005-2009*, Yogyakarta.

BPS DIY, 2011, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2006-2010*, Yogyakarta.

BPS DIY, 2012, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2007-2011*, Yogyakarta.

BPS DIY, 2013, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2008-2012*, Yogyakarta.

BPS Provinsi DIY, 2012, *“Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2007-2011”*,
Kerjasama BPS DIY Bappeda.

BPS Provinsi DIY, 2012, *ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta 2007-2011*,
Kerjasama BPS DIY Bappeda.

BPS, 2008, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Indonesia 2003-2007*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS, 2013, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Indonesia 2008-2012*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Lampiran 1

Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	BAB	Terjemahan
1	1	1	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya
2	21	2	Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."
3	29	2	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

4	33	2	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
5	37	2	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.
6	36	2	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Lampiran 2

Data Observasi

KAB/KOTA	Tahun	DF (persen)	IP (persen)	TK (jiwa)	ICOR (poin)	PDRB (persen)
_1Kota2004	2004	17.78	1.20	157544.00	4.99	5.05
_1Kota2005	2005	19.16	1.26	157553.00	4.61	4.87
_1Kota2006	2006	18.60	1.67	157426.00	5.71	3.92
_1Kota2007	2007	18.53	1.88	153797.00	5.02	4.46
_1Kota2008	2008	18.39	2.14	154858.00	4.37	5.12
_1Kota2009	2009	21.50	1.65	157003.00	4.88	4.46
_1Kota2010	2010	22.00	0.98	160275.00	4.88	4.98
_1Kota2011	2011	22.26	1.23	198308.00	4.26	5.64
_1Kota2012	2012	26.98	0.14	204477.00	4.25	5.76
_1Kota2013	2013	29.25	0.25	195818.00	4.24	5.64
_2Sleman2004	2004	14.34	0.51	435975.00	5.19	5.25
_2Sleman2005	2005	14.97	1.34	442261.00	5.75	5.03
_2Sleman2006	2006	12.90	0.61	448192.00	6.15	4.50
_2Sleman2007	2007	14.62	1.56	454204.00	5.92	4.61
_2Sleman2008	2008	14.86	1.30	457338.00	6.49	5.13
_2Sleman2009	2009	15.78	1.79	463671.00	7.90	4.48
_2Sleman2010	2010	14.91	1.03	473335.00	9.72	4.49
_2Sleman2011	2011	17.29	1.43	547151.00	8.53	5.19
_2Sleman2012	2012	11.19	2.57	554796.00	7.62	5.45
_2Sleman2013	2013	14.81	2.70	568419.00	7.46	5.70
_3Bantul2004	2004	7.72	1.15	444350.00	6.07	5.04
_3Bantul2005	2005	8.52	0.90	448887.00	6.04	4.99
_3Bantul2006	2006	7.34	1.74	448365.00	6.47	2.02
_3Bantul2007	2007	5.91	3.06	454527.00	6.77	4.52
_3Bantul2008	2008	6.82	8.37	457663.00	6.24	4.90
_3Bantul2009	2009	10.05	2.84	464001.00	6.85	4.47
_3Bantul2010	2010	11.81	3.10	473672.00	6.58	4.97
_3Bantul2011	2011	10.92	2.86	484147.00	6.08	5.27
_3Bantul2012	2012	12.46	3.18	496419.00	6.06	5.34
_3Bantul2013	2013	14.75	3.95	472808.00	5.73	5.57
_4KulonProgo2004	2004	5.91	4.94	213689.00	2.73	4.49
_4KulonProgo2005	2005	7.91	2.38	214316.00	2.60	4.77
_4KulonProgo2006	2006	7.85	6.15	214754.00	3.23	4.05
_4KulonProgo2007	2007	7.39	5.78	215198.00	3.13	4.12
_4KulonProgo2008	2008	7.68	2.45	216683.00	2.95	4.71
_4KulonProgo2009	2009	6.60	2.70	219683.00	3.51	3.97

_4KulonProgo2010	2010	7.61	5.93	224262.00	5.10	3.06
_4KulonProgo2011	2011	6.79	7.91	221781.00	3.31	4.95
_4KulonProgo2012	2012	8.39	6.28	225037.00	3.49	5.01
_4KulonProgo2013	2013	21.26	1.58	228572.00	3.49	5.05
_5GunungKidul2004	2004	6.51	1.90	412058.00	6.70	3.43
_5GunungKidul2005	2005	6.89	4.31	415164.00	4.71	4.33
_5Gunungkidul2006	2006	5.65	4.67	424910.00	5.63	3.82
_5GunungKidul2007	2007	5.42	3.36	432675.00	5.43	3.91
_5GunungKidul2008	2008	5.08	3.39	435660.00	4.87	4.39
_5GunungKidul2009	2009	4.50	4.48	441693.00	5.06	4.14
_5GunungKidul2010	2010	5.45	5.71	450900.00	5.84	4.15
_5Gunung Kidul2011	2011	4.98	5.16	399049.00	5.46	4.33
_5Gunung Kidul2012	2012	5.50	0.10	430991.00	5.03	4.84
_5Gunung Kidul2013	2013	5.69	4.69	420454.00	4.63	5.02

Lampiran 3

Analisis Fixed Effect Model

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/09/16 Time: 18:22
 Sample: 2004 2013
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.269224	1.009046	2.248880	0.0300
DF	0.056976	0.027487	2.072868	0.0445
TK	1.10E-05	3.12E-06	3.518731	0.0011
IP	0.038799	0.050406	0.769736	0.4459
ICOR	-0.423659	0.098226	-4.313111	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.572181	Mean dependent var	4.667200
Adjusted R-squared	0.488705	S.D. dependent var	0.699986
S.E. of regression	0.500524	Akaike info criterion	1.615227
Sum squared resid	10.27150	Schwarz criterion	1.959391
Log likelihood	-31.38068	Hannan-Quinn criter.	1.746287
F-statistic	6.854376	Durbin-Watson stat	2.225455
Prob(F-statistic)	0.000011		

Lampiran 4

Hasil Uji spesifikasi Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.962130	(4,41)	0.0023
Cross-section Chi-square	19.740770	4	0.0006

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: DF

Method: Panel Least Squares

Date: 04/09/16 Time: 17:53

Sample: 2004 2013

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IP	-1.057988	0.254025	-4.164889	0.0001
TK	-3.83E-05	5.26E-06	-7.287940	0.0000
ICOR	2.396387	0.491192	4.878719	0.0000
C	-3.319764	4.058674	-0.817943	0.4177
PDRB	4.075277	0.674022	6.046208	0.0000
R-squared	0.771691	Mean dependent var		11.98960
Adjusted R-squared	0.751397	S.D. dependent var		6.310075
S.E. of regression	3.146209	Akaike info criterion		5.224913
Sum squared resid	445.4385	Schwarz criterion		5.416115
Log likelihood	-125.6228	Hannan-Quinn criter.		5.297724
F-statistic	38.02537	Durbin-Watson stat		1.651300
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.848519	4	0.0005

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IP	-0.644604	-1.057988	0.017459	0.0018
TK	0.000018	-0.000038	0.000000	0.0025
ICOR	0.312492	2.396387	0.229038	0.0000
PDRB	1.664876	4.075277	0.309112	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: DF

Method: Panel Least Squares

Date: 04/09/16 Time: 17:54

Sample: 2004 2013

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.829102	5.774072	-0.316779	0.7530
IP	-0.644604	0.255306	-2.524827	0.0155
TK	1.76E-05	1.90E-05	0.924063	0.3609
ICOR	0.312492	0.638331	0.489545	0.6271
PDRB	1.664876	0.803175	2.072868	0.0445

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.846165	Mean dependent var	11.98960
-----------	----------	--------------------	----------

Lampiran 6

KOTA	TAHUN	PAD	TPD	DDF
JOGJA	2004	7 9.911,43	4 49.561,31	17,78
	2005	8 9,196,42	4 65.545,97	19,16
	2006	9 6,551,93	5 19.154,57	18,60
	2007	114.098,35	615.648,85	18,53
	2008	132.427,04	720.248,40	18,39
	2009	161.482,44	751.100,72	21,50
	2010	179.423,64	815.495,92	22,00
	2011	228.870,56	1.027.988,3	22,26
	2012	338.283,73	1.253.617,13	26,98
	2013	383.052,14	1.309.580,19	29,25
SLEMAN	2004	70.499,051	491.568,200	14,34
	2005	77.904,742	520.548,874	14,97
	2006	90.710,095	702.929,580	12,90
	2007	120.656,548	825.004,186	14,62
	2008	140.631,359	946.476,028	14,86
	2009	157.231,267	996.182,714	15,78
	2010	80.611,542	1.096.205,412	14,91
	2011	142.698,407	1.311.473,547	17,29
	2012	177.835,870	1.589.722,974	11,19
	2013	281.385,141	1.899.497,710	14,81
Bantul	2004	30.777,820	398.879,893	7,72
	2005	37.683,848	442.291,64	8,52
	2006	44.005,31	599.619,65	7,34

	2007	43.027,04	727.836,912	5,91
	2008	69.800,761	1.023.590,21	6,82
	2009	88.691,363	882.149,788	10,05
	2010	116.541,250	986.866,902	11,81
	2011	128.900,086	1.180.550,742	10,92
	2012	166.597,778	1.337.570,73	12,46
	2013	224.197,857	1.520.302,696	14,75
KP	2004	17.514,81	296.569,11	5,91
	2005	24.332,50	307.791,02	7,91
	2006	35.203,28	448.371,80	7,85
	2007	38.637,83	522.937,81	7,39
	2008	42.289,208	550.848,574	7,68
	2009	39.358,629	596.428,928	6,60
	2010	48.190,802	633.089,180	7,61
	2011	53.752,293	791.826,638	6,79
	2012	74.028,663	882.586,664	8,39
	2013	95.991,513	451.465,753	21,26

Lampiran 7

Data ICOR Menurut Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta

KAB/KOTA	2004		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1005468	201550	4,99
Sleman	1252377	241150	5,19
Bantul	897751	147930	6,07
Kulon Progo	163861,2	60040	2,73
Gunungkidul	580687	86720	6,70

KAB/KOTA	2005		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	932703	202460	4,61
Sleman	1398484	243180	5,75
Bantul	929637	153860	6,04
Kulon Progo	173456,7	66740	2,60
Gunungkidul	533460	113150	4,71

KAB/KOTA	2006		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	997389	174650	5,71
Sleman	1406253	228500	6,15
Bantul	1078587	65480	6,47
Kulon Progo	191759,6	59370	3,23
Gunungkidul	586252	104190	5,63

KAB/KOTA	2007		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1023639	203900	5,02
Sleman	1447923	244530	5,92
Bantul	1010709	149300	6,77
Kulon Progo	196500,5	62780	3,13
Gunungkidul	600988	110710	5,43
KAB/KOTA	2008		
	ΔK	ΔY	ICOR

Kota	1068282	244600	4,37
Sleman	1848630	284656	6,49
Bantul	1054191	169050	6,24
Kulon Progo	219599	74370	2,95
Gunungkidul	628653	129008	4,87

KAB/KOTA	2009		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1091628	223851	4,88
Sleman	2065350	261311	7,90
Bantul	1108750	161948	6,85
Kulon Progo	232444,2	66304	3,51
Gunungkidul	653435	129018	5,06

KAB/KOTA	2010		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1274814	261149	4,88
Sleman	2661114	273643	9,72
Bantul	1236708	187980	6,58
Kulon Progo	270138	52923	5,10
Gunungkidul	763321	130763	5,84

KAB/KOTA	2011		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1324708	311000	4,88
Sleman	2821540	330900	9,72
Bantul	1271487	209276	6,58
Kulon Progo	291422	88111	5,10
Gunungkidul	787185	144209	5,84

KAB/KOTA	2012		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1424614	335000	4,25
Sleman	2781054	364900	7,62
Bantul	1350840	222796	6,06
Kulon Progo	326734	93662	3,49
Gunungkidul	846526	168274	5,03

KAB/KOTA	2013		
	ΔK	ΔY	ICOR
Kota	1471165	347000	4,24
Sleman	3005965	403000	7,46
Bantul	1404680	245000	5,73
Kulon Progo	348838	100000	3,49
Gunungkidul	867130	187438	4,63

Lampiran 8**Persentase PDRB Menurut Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta**

KABUPATEN/KOTA	Tahun	PDRB	%PDRB
KULON PROGO	2004	1398743	4,49
KULON PROGO	2005	1465477	4,77
KULON PROGO	2006	1524848	4,05
KULON PROGO	2007	1587630	4,12
KULON PROGO	2008	1662370	4,71
KULON PROGO	2010	1781227	3,06
KULON PROGO	2011	1869338	4,95
KULON PROGO	2012	1963028	5,01
KULON PROGO	2013	2062182	5,05
BANTUL	2004	3080312	5,04
BANTUL	2005	3234173	4,99
BANTUL	2006	3299646	2,02
BANTUL	2007	3448949	4,52
BANTUL	2008	3618060	4,90
BANTUL	2009	3779948	4,47
BANTUL	2010	3967928	4,97
BANTUL	2011	4177201	5,27
BANTUL	2012	4400313	5,34
BANTUL	2013	4645476	5,57
GUNUNG KIDUL	2004	2613238	3,43
GUNUNG KIDUL	2005	2726389	4,33
GUNUNG KIDUL	2006	2830583	3,82
GUNUNG KIDUL	2007	2941288	3,91

GUNUNG KIDUL	2008	3070298	4,39
GUNUNG KIDUL	2009	3197365	4,14
GUNUNG KIDUL	2010	3330080	4,15
GUNUNG KIDUL	2011	3474288	4,33
GUNUNG KIDUL	2012	3642562	4,84
GUNUNG KIDUL	2013	3825350	5,02
SLEMAN	2004	4837376	5,25
SLEMAN	2005	5080563	5,03
SLEMAN	2006	5309059	4,50
SLEMAN	2007	5553580	4,61
SLEMAN	2008	5838246	5,13
SLEMAN	2009	6099557	4,48
SLEMAN	2010	6373200	4,49
SLEMAN	2011	6704100	5,19
SLEMAN	2012	7069229	5,45
SLEMAN	2013	7471898	5,70
KOTA	2004	4195392	5,05
KOTA	2005	4399902	4,87
KOTA	2006	4572504	3,92
KOTA	2007	4776401	4,46
KOTA	2008	5021149	5,12
KOTA	2009	5244851	4,46
KOTA	2010	5505942	4,98
KOTA	2011	5816568	5,64
KOTA	2012	6151679	5,76
KOTA	2013	6498900	5,64

Lampiran 9**CURRICULUM VITAE**

Name Nur Fajri Khumairoh
 Address Geblog, Wukirsari
 Cangkringan
 Sleman.
 Phone 082 225 943 120
 E-mail fajrikhumairoh@gmail.com
 Blog fajrikhumairoh.blogspot.com
 Date of birth Januari 20th 1994
 Nationality Indonesia
 Sex Female
 Marital status Single

Education

2001-2006 TKA Aisyiyah Bustanul Athfal, Cangkringan
 2006-2009 SD Muhammadiyah Kregan, Cangkringan
 2009-2012 SMA N 1 Pakem, Sleman
 2012-2016 State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta

Languages Indonesia, English, Arabic.